

BONUM COMMUNE DALAM BINGKAI KEBANGSAAN: PERJUANGAN PARTAI KATOLIK

Oleh : Petrus Canisius Edi Laksito

*(Pengajar Teologi di Institut Teologi Yohanes Maria Vianney,
Keuskupan Surabaya)*

Abstract

To speak of bonum commune from the standpoint of the tradition of the Indonesian Catholic Church, this paper does not emphasize the theories of thinkers or their leaders. The priority is precisely the “struggle practices” of the Catholics seeking “conditions of inner and outer well-being” for each individual citizen and community groups in the life of the Indonesian nation. From there it is hoped that the relevance of the idea of bonum commune can be found and its significance for living together. At the pragmatic level, the benchmarks are of course the fruits for the Indonesian people. Normatively, ideologically, the measure is its compatibility with the principles of nation and state, namely Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika. In order for the discussion to be on its track to understand the bonum commune according to Church doctrine, a few items of understanding from the Church’s official sources were previously presented.

This study was directed at the first period of the Catholic Party’s journey, covering the period from its establishment until the recognition of the sovereignty of the Republic of Indonesia by the Dutch Government on December 27, 1949. The recognition it self was the final result of the Round Table Conference (Ronde Tafel Conferentie), namely a meeting between the Netherlands and Indonesia in The Hague, the Netherlands on August 23 to November 2, 1949. The two periods after that, namely the period of liberal democracy and guided democracy as well as the initial period of the New Order to fusion into the Indonesian Democratic Party, are expected to be discussed in other opportunities .

Keywords: *Catholic, Indonesia, Bonum Commue*

Sebagai prinsip sosial, gagasan *bonum commune* berbicara tentang keseluruhan kondisi-kondisi di masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, yang membuat setiap pribadi manusia dan kelompok-kelompok di masyarakat mendapatkan kesempatan dan sarana terbaik untuk berkembang dan mewujudkan kesempurnaan diri, baik secara lahir maupun batin.¹ Gagasan yang bersifat universal ini secara permanen diadopsi oleh Gereja Katolik dalam sistem ajaran sosialnya, justru karena universalitasnya yang memberikan jaminan akan kebaikan Allah bagi setiap individu dan kaum sebagai ciptaan-Nya.²

Prinsip “kebaikan” yang berdimensi universal ini diyakini oleh Gereja Katolik sebagai kehendak Tuhan dan menjadi inti tradisi yang dihayatinya sejak semula. Yesus, pewahyuan Allah yang paripurna dan pendiri Gereja, membawa kabar gembira datangnya “Tahun rahmat Tuhan” bagi seluruh umat manusia, khususnya yang miskin, lapar, berkesusahan dan menderita (Luk 4:18-21). Dengan hidup sampai wafatnya Yesus menunjukkan bahwa *bonum Dei*, kebaikan Allah, tidak diskriminatif tetapi justru bersifat umum, *commune*, bagi semua orang, termasuk bagi kalangan yang kerap disisihkan dan tidak diperhatikan di masyarakat. *Bonum Dei* atau kebaikan Allah dimaksudkan untuk meneguhkan *bonum commune hominum* atau kebaikan umum manusia. *Bonum commune* dalam arti ini menjadi prinsip ajaran sosial Gereja, direfleksikan dalam kesesuaiannya dengan warta Kristiani

¹ Definisi *bonum commune* terdapat dalam dokumen Konsili Vatikan II *Gadium et Spes* (1965) art. 26, yaitu “*summam eorum vitae socialis condicionum quae tum coetibus, tum singulis membris permittunt ut propriam perfectionem plenius atque expeditius consequantur*”. Dalam http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_lt.html 15 September 2017. *Bonum commune* biasanya diterjemahkan dengan “kesejahteraan umum” atau “kebaikan umum”, yaitu “keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan bagi kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri”.

² Thomas Aquinas mengadopsi gagasan *bonum commune* dari Aristoteles *to koinei sympheron* (kepentingan umum), sebagai inti teori politiknyadalam *Politik III*. Aristoteles tidak banyak mengelaborasi gagasan ini dalam seluruh karyanya. Sebaliknya Thomas mengkajinya secara lebih luas dalam *Summa Theologiae* I-II, 90-108. Mary M. Keys, *Aquinas, Aristotle, and the Promise of the Common Good*, Cambridge University Press, New York 2006, hlm. 3, juga 20. Juga B.J. Diggs, “The Common Good as Reason for Political Action,” *Ethics* 83, no. 4 (Jul., 1973): 283. Aquinas merupakan rujukan bagi pemikir dan pemuka agama Katolik dalam mengembangkan pemikiran sosial-etis yang berfokus pada gagasan *bonum commune*. Ulasan secara garis besar tentang asal-usul thomistik-aristotelian gagasan *bonum commune* yang berkarakter personalistik ini dan pengembangannya ke dalam ajaran sosial Gereja, serta perbedaannya dengan filsafat-filsafat sosial beraliran liberal dan liberal-kesejahteraan serta komunitarian dan totalitarian tentang *bonum commune* dapat dibaca dalam Antonio Argandoña, “The Common Good”, *Working Paper* WP-937, July 2011, IESE Business School-University of Navarra, diunduh pada 15 September 2017 dari <http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0937-E.pdf>

bagi umat manusia.³

Untuk berbicara tentang *bonum commune* dari sudut tradisi Gereja Katolik Indonesia, makalah ini tidak menekankan teori para pemikir atau pemukanya. Yang diutamakan justru “praktik perjuangan” kalangan Katolik mengupayakan “kondisi-kondisi kesejahteraan lahir-batin” bagi setiap individu warga dan kelompok-kelompok masyarakat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dari situ diharapkan dapat ditemukan relevansi gagasan *bonum commune* dan signifikansinya bagi hidup bersama. Pada tataran pragmatis, tolok ukurnya tentulah buah-buahnya bagi bangsa Indonesia. Secara normatif-ideologis, ukurannya adalah kecocokannya dengan prinsip berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Agar pembahasan berada pada relnya untuk memahami *bonum commune* seturut doktrin Gereja, sebelumnya disajikan beberapa butir pemahaman dari sumber resmi Gereja.

Secara terbatas, kajian ini diarahkan pada periode pertama perjalanan Partai Katolik, meliputi kurun waktu sejak berdirinya sampai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan itu sendiri merupakan hasil akhir dari Konferensi Meja Bundar (*Ronde Tafel Conferentie*), yaitu pertemuan antara Belanda dan Indonesia di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dua periode setelah itu, yaitu periode demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin serta periode awal Orde Baru hingga fusi ke dalam Partai Demokrasi Indonesia, diharapkan dapat dibahas dalam kesempatan lainnya.

³ Paus Leo XIII (1810-1903), pelopor ajaran sosial zaman modern, berbicara tentang *bonum commune* para warga sebagai azas pembuatan hukum dalam surat edaran atau ensiklik *Libertas Praestantissimum* (1888). Ia menggarisbawahi arti kebebasan sejati dalam *bonum commune*, dan mengkritik liberalisme yang mengabaikan kepatuhan hukum demi kebebasan. Baginya, hukum manusiawi yang diundangkan demi *bonum commune* berlaku bagi tiap-tiap pribadi dalam masyarakat, seperti halnya akal budi dan hukum alam/kodrati mengikat bagi individu-individu. Seterusnya, gagasan *bonum commune* dalam Gereja Katolik dapat ditelusuri dari ensiklik Paus Pius XI (*Quadragesimo Anno*, 1931), Yohanes XXIII (*Mater et Magistra*, 1961 dan *Pacem in Terris*, 1963), Paulus VI (*Populorum Progressio*, 1967), Yohanes Paulus II (*Sollicitudo Rei Socialis*, 1987 dan *Centesimus Annus*, 1991) serta konstitusi pastoral Konsili Vatikan II (*Gaudium et Spes*, 1965). Lihat indeks *the common good* yang merujuk pada dokumen-dokumen tersebut dalam J. Neuner SJ dan J. Dupuis SJ, *The Christian Faith in the Doctrinal Documents of the Catholic Church* (Jaques Dupuis ed.), seventh revised and enlarged edition, Theological Publications in India, Bangalore 2013, hlm. 901. Konsili Vatikan II (1965) menegaskan bahwa kaum awam (non-hirarki) mengemban tugas merasul di dunia mewujudkan *bonum commune*, seturut ajaran moral dan sosial Gereja. Hal ini dinyatakan dalam dekret tentang kerasulan awam *Apostolicam Actuositatem* (1965). Lihat AA art. 14 dan 31 dalam http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_1t.html diunduh pada 20 September 2017.

1. Garis Besar Ajaran: Katekismus Gereja Katolik (1985)⁴

Katekismus Gereja Katolik (KGK) terbitan 1985, dokumen otoritatif dan menyeluruh tentang ajaran Gereja Katolik saat ini, menempatkan *bonum commune* atau kesejahteraan umum dalam rangka pembahasan tentang komunitas manusia-wi yang mencakup 3 tema, yaitu pribadi dan masyarakat, partisipasi dalam hidup sosial dan keadilan sosial. *Bonum commune* sendiri ditempatkan pada pembahasan tema kedua tentang partisipasi dalam hidup sosial.⁵

Untuk membahas partisipasi dalam hidup sosial, dijelaskan lebih dahulu otoritas (*auctoritas*) atau wewenang, yaitu “kualitas yang membuat pribadi atau lembaga dapat memberikan hukum dan perintah kepada manusia, serta mengharapkan kepatuhan dari mereka” (KGK art. 1897). Dikatakan bahwa dari dirinya otoritas tidak memiliki legitimasi moral, tapi harus bertumpu pada kebebasan pribadi dan kesadaran akan beban dan kewajiban yang diterima. Maka otoritas tidak boleh berlaku tiran, dan harus bekerja demi kesejahteraan umum (*pro bono communi*). Sedangkan hukum yang diundangkan oleh pemegang otoritas, agar mempunyai nalar atau hakikat hukum (*ratio legis*), harus seturut akal budi yang benar (*secundum rationem rectam*). Jika tidak, hukum itu disebut hukum yang tak adil (*lex iniqua*), yang hakikatnya merupakan kekerasan (*ratio violentiae*) (KGK art. 1902).⁶

Selanjutnya barulah dibicarakan kesejahteraan umum atau *bonum commune*. Seturut kodrat sosial yang melekat pada diri manusia, kesejahteraan tiap individu terkait dengan kesejahteraan umum; di sisi lain, kesejahteraan umum hanya dapat dirumuskan dalam hubungannya dengan pribadi manusia. Adapun kesejahteraan umum dipahami sebagai “keseluruhan kondisi-kondisi hidup sosial yang memungkinkan bagi kelompok-kelompok maupun anggota-anggota secara perorangan untuk meraih kesempurnaan masing-masing secara lebih penuh dan lebih leluasa”.⁷ Karena *bonum commune* terkait dengan hidup semua individu, maka diperlukan kehati-hatian (*prudentia*) dari setiap orang, terlebih dari mereka yang menjalankan tugas-tugas otoritas (KGK art. 1905-1906).

Bonum commune sendiri mensyaratkan adanya 3 unsur hakiki. *Pertama*, penghargaan martabat pribadi manusia dan hak-hak azasinya serta upaya-upaya memperjuangkannya. Dengan penghargaan tersebut setiap pribadi dapat bertindak seturut hati nuraninya yang benar, memperoleh perlindungan hidup dan menikmati

⁴ *Katekismus Gereja Katolik* (KGK) yang diterbitkan tahun 1985 berdasar wewenang Paus Yohanes Paulus II merupakan suatu kumpulan segala macam gagasan dan refleksi iman yang dimaksudkan sebagai rujukan resmi bagi semua pihak dalam mengkaji dan memperkenalkan ajaran Gereja Katolik. Edisi resminya (*editio typica*) berbahasa Latin, berfungsi sebagai rujukan yang bersifat universal bagi teks-teks berbahasa modern.

⁵ Rujukan teks Latin pada http://www.vatican.va/archive/catechism_lt/index_lt.htm dilihat pada 2 Oktober 2017, sedangkan rujukan pada teks Indonesia lihat pada Konferensi Waligereja Indonesia, *Katekismus Gereja Katolik*, Nusa Indah, Flores 2007³.

⁶ KGK art. 1902 merujuk pada *Gaudium et Spes* art. 74 dan *Summa Theologiae* I-II, q. 93. A. 3, ad 2.

⁷ Definisi merujuk pada *Gaudium et Spes* art. 26.

kebebasan sewajarnya, termasuk dalam hidup beragama. Dengan demikian tiap-tiap pribadi dapat mewujudkan panggilannya. *Unsur kedua*, kesejahteraan sosial masyarakat dan perkembangannya di segala bidang. Dalam hal ini otoritas berhak bertindak sebagai wasit di antara berbagai kepentingan khusus karena alasan kesejahteraan umum (*propter bonum commune*). Otoritas harus memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk memperoleh hal-hal yang ia butuhkan untuk hidup secara sungguh manusiawi, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan pembinaan, informasi yang benar dan hak untuk membangun keluarga. *Ketiga*, damai, yaitu stabilitas tata keadilan dan keamanan. Maka diandaikan bahwa otoritas dengan sarana-sarana yang sah menjamin keamanan masyarakat dan anggota-anggotanya. Ia harus menjamin hak untuk membela diri baik secara pribadi maupun bersama (KGK art. 1907-1909).⁸

Tiap komunitas manusiawi memiliki unsur-unsur *bonum commune*, namun *bonum* semacam ini terlaksana paling penuh dalam komunitas politik. Adalah tugas negara untuk menjaga dan memperjuangkan kesejahteraan umum masyarakat sipil, para warga dan badan-badan lain yang lebih kecil. Namun karena manusia tergantung satu sama lain sebagai satu keluarga dengan martabat kodrati yang sama, dibutuhkan pula pengorganisasian komunitas bangsa-bangsa yang meliputi seluruh dunia untuk mewujudkan kesejahteraan umum seluruh umat manusia (*bonum commune universale*). “Kesejahteraan umum selalu terarah pada kemajuan pribadi-pribadi sebagai yang pokok dan harus diutamakan, dan bukan sebaliknya.”⁹ Maka tata sosial untuk mewujudkannya harus didasarkan pada kebenaran, dibangun di atas keadilan, dan dijiwai dengan cinta kasih (KGK art. 1910-1912).

Penentuan sistem pemerintahan dan penunjukan pejabatnya hendaknya diserahkan kepada kebebasan kehendak para warga.¹⁰ Kebhinnekaan sistem politik pemerintahan secara moral diperkenankan, asalkan sistem-sistem itu melayani kesejahteraan sah komunitas yang memilih sistem tersebut. Sistem-sistem pemerintahan yang perangnya melawan hukum kodrat, tertib publik dan hak-hak azasi pribadi-pribadi, terbukti tidak mampu mewujudkan kesejahteraan umum bangsa-bangsa yang menjadi tanggung jawabnya (KGK art. 1901).

Setelah *auctoritas* dan *bonum commune*, dibahas unsur yang membuatnya terwujud, yakni *participatio* atau partisipasi, yaitu kewajiban pribadi dalam perkara-perkara sosial yang bersifat sukarela dan keluar dari kemurahan hati. Semua orang, sesuai dengan tempat dan perannya masing-masing, harus berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan umum. Tugas ini secara mutlak terkait dengan martabat pribadi manusia (KGK art. 1913).

Partisipasi terlaksana ketika orang menerima beban dalam aneka bidang kehidupan disertai tanggung jawab pribadi, entah dalam pendidikan keluarga mau-

⁸ Tentang unsur-unsur *bonum commune* KGK merujuk pada Ibid.

⁹ Rujukan pada Ibid.

¹⁰ Rujukan pada Ibid., art. 74.

pun dalam pekerjaannya.¹¹ Sejauh mungkin para warga harus terlibat aktif dalam kehidupan publik. Meskipun jenis dan cara keterlibatan bisa berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya dan dari kebudayaan ke kebudayaan yang lain, namun patut dipuji cara-cara yang ditempuh oleh bangsa-bangsa yang memberi kemungkinan bagi sebanyak mungkin warga untuk terlibat dengan sungguh-sungguh bebas dalam perkara-perkara publik¹² (KGK art. 1914-1915).

Partisipasi semua orang dalam karya demi kesejahteraan umum (*pro bono communi*), layaknya setiap kewajiban etis, mensyaratkan adanya pertobatan pribadi-pribadi warga yang diperbarui terus-menerus. Tipu daya mengelak dari undang-undang dan aturan sosial harus dikecam keras karena melanggar keadilan. Lembaga-lembaga yang berupaya memperbaiki taraf hidup manusiawi harus didukung.¹³ Pihak-pihak yang menjalankan otoritas harus menegaskan nilai-nilai yang membangkitkan kepercayaan sesama warga dan mengajak mereka mengabdikan kepada sesama. Partisipasi dimulai dari pendidikan dan pembinaan, karena nasib umat manusia masa depan terletak di tangan orang-orang yang mampu mewariskan kepada generasi mendatang dasar untuk hidup dan berharap¹⁴ (KGK art. 1916-1917).

2. ***Bonum Commune* Dalam Tradisi Katolik Indonesia: Peran Kunci Partai Katolik**

Upaya Katolik demi kesejahteraan atau kebaikan umum bangsa Indonesia sudah dimulai sejak awal abad ke-16. Upaya ini berlangsung melalui para pewarta iman Katolik berkebangsaan Portugis, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Namun upaya ini segera terhenti karena mereka diusir oleh perkumpulan dagang Belanda di Hindia Timur *Verenigde Oost Indische Compagnie* atau disingkat VOC, yang mengambil alih kekuasaan atas wilayah kepulauan ini pada akhir abad ke-17. Baru setelah periode kekosongan yang panjang, upaya ini dapat terlaksana lagi di awal abad ke-19 pada periode penjajahan Belanda selanjutnya.¹⁵

Upaya memperjuangkan *bonum commune* melalui tradisi Katolik di Indonesia pada dasarnya meliputi berbagai bidang kehidupan yang luas, karena umat Katolik, yang sedikit sekali jumlahnya, tersebar di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Para misionaris Belanda sejak akhir abad ke-19 meyakini dan memilih bidang pendidikan dan kesehatan sebagai ujung tombak perwujudan *bonum commune* bagi bangsa Indonesia. Hingga kini, karya pendidikan dan kesehatan

¹¹ Rujukan pada surat edaran atau Ensiklik oleh Paus Yohanes Paulus II, *Centesimus Annus*, art. 43.

¹² Rujukan pada *Gaudium et Spes*, art. 31.

¹³ Merujuk Ibid., art. 30.

¹⁴ Merujuk Ibid., art. 31.

¹⁵ Untuk memperoleh gambaran tentang kehadiran Gereja Katolik di Indonesia, lihat misalnya *Sejarah Gereja Katolik di Indonesia*, Kursus Kader Katolik, Sekretariat Nasional K.M./C.L.C. Jakarta 1971.

merupakan pilar-pilar kuat tradisi *bonum commune* Katolik di Indonesia. Melalui upaya pencerdasan kehidupan bangsa dan penyehatan badan dan jiwa masyarakat, serta melalui karya di bidang-bidang lainnya, umat Katolik hadir dalam arus perjuangan *bonum commune* manusia Indonesia yang seutuhnya.

Ketika mendapat izin kembali dari Pemerintah Belanda untuk masuk ke wilayah Hindia Belanda di abad ke-19, misi Katolik tidak terlepas dari upaya memperjuangkan kesejahteraan umum, terlebih bagi masyarakat non-Eropa. Upaya ini mula-mula dijalankan oleh rohaniwan-rohaniwati dan umat beriman awam Belanda.

Dalam perkembangannya lambat laun, terdapat orang-orang Indonesia, baik pribumi maupun Tionghoa, yang ikut bergabung ke dalam komunitas Katolik, dan ikut terlibat dalam mewujudkan *bonum commune*. Bahkan, di aras paling fundamental bagi masa depan bangsa Indonesia, yaitu secara politik-kenegaraan, orang-orang Indonesia ini tampil sebagai pelaku *bonum commune* yang tak tergantikan dari tradisi Katolik bersama sesama warga bangsa. Tentu dengan tetap dicatat bahwa guru-guru perjuangan mereka justru adalah para misionaris Belanda, yang dengan sepenuh hati mendukung suatu Indonesia yang merdeka.

Dengan latar belakang ini, di sini hendak diketengahkan sejumlah kisah dan sudut pandang tentang bagaimana *bonum commune* sebagai prinsip yang diyakini nilainya dalam kancah sosial diperjuangkan oleh umat Katolik Indonesia, khususnya dalam bidang politik. Kisahnya sendiri merupakan kisah sejarah, direpresentasikan oleh Partai Katolik. Partai ini dalam arti sesungguhnya hanya tinggal kenangan, karena hidupnya berakhir dengan berfusi ke dalam partai baru bernama PDI (Partai Demokrasi Indonesia) pada tahun 1973. Fusi itu ditempuh dalam rangka penyederhanaan partai-partai di masa awal Orde Baru bersama dengan Parkindo (Partai Kristen Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) dan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia).¹⁶

Meski tidak lagi hadir dalam kancah politik nasional, dan tidak tampil kembali ke permukaan saat sistem politik multipartai dan aliran dihidupkan kembali di era reformasi, perjuangan Partai Katolik tetap layak dicatat dan diperhatikan sebagai representasi Katolik Indonesia memperjuangkan *bonum commune* dalam bidang politik. *Pertama*, karena secara historis partai ini berperan nyata bersama semua elemen bangsa untuk Indonesia merdeka, yang buah-buahnya kita nikmati sekarang ini. *Kedua*, pada tataran gerakan, Partai Katolik beserta para tokohnya tetap dapat dan masih menjadi inspirasi dan model perjuangan dalam spirit *bonum commune* di bidang politik bagi umat Katolik. Dari kajian tentang institusi politik ini beserta tokoh-tokohnya kiranya akan dapat lebih dipahami alasan individu-individu dan kelompok-kelompok Katolik tetap hadir di tengah masyarakat Indonesia dewasa ini.

¹⁶ A. Heuken SJ, *Ensiklopedi Populer Tentang Gereja Katolik di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1989, hlm. 305.

3. Munculnya Partai Katolik

Kompleks persekolahan Katolik di Muntilan, yang mulai dirintis pada tahun 1890 dan terus berkembang pada tahun-tahun sesudahnya, praktis menjadi tempat lahirnya kesadaran nasional di antara orang-orang Katolik di Indonesia. Rm. F.G.J. van Lith SJ, pendirinya, menyebut semangat atau kesadaran ini sebagai “kebangkitan orang Jawa”. Orientasi misioner Rm. van Lith sendiri saat itu memang berkarakter lokal sesuai dengan arah perutusannya, yang ditujukan kepada orang-orang Jawa. Namun perlu dicatat bahwa gagasan “kebangkitan” ini meliputi wilayah yang lebih luas, yakni seluruh koloni Hindia-Belanda.¹⁷

“Kebangkitan” itu pada tahun 1923 ditandai dengan pendirian sebuah partai Katolik bernama *Pakempalan Politik Katolik Djawi* di Yogyakarta, atas prakarsa Rm. van Lith dan Rm. van Rijckevorsel, serta sekitar 30 orang, terdiri dari beberapa guru dan alumni sekolah Muntilan. F.S. Harijadi, yang telah menjadi kepala sekolah, ditunjuk sebagai ketua, I.J. Kasimo, guru di sebuah sekolah pertanian, ditunjuk sebagai sekretaris dan R.M. J. Soedjadi, dokter hewan, ditunjuk sebagai bendahara. Pendirian partai dari unsur Katolik oleh para mantan murid sekolah Muntilan ini praktis terjadi 15 tahun setelah kelahiran *Boedi Oetomo* di Jakarta pada tahun 1908, dan 11 tahun setelah *Sarekat Islam* di Solo dan *Indische Partij* di Bandung pada tahun 1912. Pada tahun 1923 itu juga, tak lama setelah berdirinya, perkumpulan ini berganti nama menjadi Perkumpulan Politik Katolik di Djawa (PPKD).¹⁸

Tujuan pendirian partai ini, menurut Kasimo, adalah agar kepentingan-kepentingan Gereja dalam politik dapat diperjuangkan sebaik mungkin oleh sebuah partai Katolik sendiri, mengingat perjuangan semacam ini tak dapat dilaku-

¹⁷ Jan Bank, *Katolik di Masa Revolusi Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 1999, hlm. 43. Hardawiryana mencatat, Rm. van Lith dalam buku hariannya menulis bahwa masa depan kepulauan Indonesia, yang secara geografis namun terlebih secara politik dengan gerakan-gerakan kemerdekaan berpusat di Jawa, harus dibangun oleh orang-orang Indonesia sendiri. Hak-hak orang pribumi harus dijamin. Maka juga orang-orang Katolik Indonesia sendiri harus bertanggung jawab terhadap masa depan Gereja Katolik di kepulauan ini. Robert Hardawiryana, “The Involvement of the Laity in Politics: The Church in Indonesia”, dalam *FABC Papers* No. 58, hlm. 16. Diunduh dari http://www.fabc.org/fabc%20papers/fabc_paper_58.pdf pada 18 September 2017.

¹⁸ Bank, *Katolik*, hlm. 44 dan 54. Hardawiryana, “The Involvement”, hlm. 18. Leo van Rijckevorsel membentuk paguyuban orang-orang Jawa, mula-mula dengan nama Belanda *Katholieke Javanen Vereniging voor Politieke Actie* (Perkumpulan Aksi Politik untuk orang Jawa Katolik). Terdapat nama R.M. Soejadi Djajasepoetra, Ignatius Kasimo, C. Pranoto dan F. Soetrisno. Pertemuan pada 5 Agustus 1923 dengan sekitar 45 orang. Statuta diserahkan kepada pemerintah pada 14 Agustus 1923. Karel Steenbrink, *Orang-orang Katolik di Indonesia 1808-1942. Pertumbuhan yang Spektakuler dari Minoritas yang Percaya Diri 1903-1942. Jilid 2*. Penerbit Ledalero Maumere 2006, hlm. 87-88. Lihat juga J.B. Soedarmanta, *Politik Bermartabat, Biografi I.J. Kasimo*, Kompas, Jakarta 2004, hlm. 63-69. Buku ini banyak memberikan informasi tentang konteks pendirian partai.

kan oleh organisasi seperti *Boedi Oetomo* yang netral secara keagamaan.¹⁹ Selain itu, disadari bahwa untuk memperjuangkan cita-cita nasional, orang-orang Katolik terikat pada cara-cara perjuangan yang sesuai dengan prinsip dan keyakinan Katolik, misalnya dalam sikap anti-kekerasan. Maka dibutuhkan partai secara tersendiri, yang turut menyumbang andil dari pihak Katolik bagi perjuangan nasional.²⁰

Pendirian partai Katolik sendiri mendapatkan legitimasinya dari pamflet yang dibuat oleh Rm. van Lith pada tahun 1922 berjudul “*De politiek van Nederland ten opzichte van Nederlands Indie*” (Politik Belanda Tentang Hindia-Belanda). Dalam pamflet tersebut Rm. van Lith menyatakan bahwa era kolonial telah berakhir, dan jika ingin supaya hak-haknya sendiri diakui, Belanda harus mengakui hak-hak rakyat pribumi. Belanda, Indo-Belanda dan Jawa harus hidup bersama dalam damai sebagai saudara. Pamflet ini pada tahun 1930 dikutip oleh Ir. Soekarno dalam pembelaannya di depan pengadilan negeri Bandung.²¹

Rupanya munculnya PPKD menjadi penanda pecahnya perjuangan politik Katolik kelak, yang semula ditempuh melalui *Indische Katholieke Partij* (IKP, Partai Katolik Hindia). IKP sendiri berdiri 5 tahun sebelumnya, pada 1918, sebagai asosiasi perjuangan berbagai kelompok Katolik di Hindia-Belanda berdasarkan Ajaran Sosial Gereja.²² IKP berdiri setelah *Volksraad* (Dewan Rakyat) dibentuk oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1916.²³ Pada saat berdirinya pada tahun 1923, PPKD masih bernaung di bawah IKP sebagai organisasi federasi Katolik. Namun pada tahun 1925, Undang-undang Dasar Hindia (*Indische Staatsregeling*) yang baru mengatur bahwa seseorang harus memilih sesuai kebangsaan untuk dapat memperoleh utusan di dalam *Volksraad*. Dengan ketentuan ini, pemilih Belanda hanya dapat memilih calon Belanda, orang Timur (Cina) hanya memilih orang Timur, dan pribumi memilih pribumi. Akibatnya IKP praktis menjadi partai orang-orang Katolik Belanda saja. Akibatnya juga, PPKD hanya bisa memperoleh

¹⁹ Bank, *Katolik*, hlm. 44. Beberapa orang Katolik Jawa sebelumnya tertarik dan bergabung ke dalam cabang-cabang *Boedi Oetomo* dan ikut dalam kepengurusannya. Namun mereka tidak puas dengan posisi *Boedi Oetomo*. Salah satunya adalah F.S. Harijadi, wakil ketua *Boedi Oetomo*, mantan murid *kweekschool* (sekolah guru) Muntilan yang turut mendirikan PPKD dan menjadi ketuanya. Hardawirya, “The Involvement”, hlm. 16.

²⁰ Bank, *Katolik*, hlm. 44.

²¹ Hardawirya, “The Involvement”, hlm. 17-18.

²² Bank, *Katolik*, hlm. 45. Juga Hardawirya, “The Involvement”, hlm. 17.

²³ Dewan ini berfungsi sebagai pendamping pemerintah Hindia Belanda, dengan hak suara dalam penyusunan undang-undang, hak mengajukan petisi kepada Ratu, Perdana Menteri dan Gubernur Jenderal tentang persoalan Hindia-Belanda, dan hak ikut serta menyusun anggaran tahunan. Secara praktis tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jenderal, meskipun dalam kenyataannya rekomendasi ini kerap diabaikan. Lihat Ratih D Adiputri “The Dutch Legacy in the Indonesian Parliament”, *Political Sciences & Public Affairs*, Volume 2, July 03, 2014, hlm. 1 dalam <https://www.omicsonline.org/open-access/the-dutch-legacy-in-the-indonesian-parliament1-2332-0761.1000118.pdf> diunduh pada 8 September 2017.

suara dari orang-orang pribumi, dan harus mengambil langkah sendiri untuk dapat bersuara di Dewan Rakyat.²⁴

Secara definitif PPKD melepaskan diri dari IKP pada 22 Februari 1925 dan menjadi partai independen. Dengan cita-citanya yang nasionalistis, dalam perjuangannya partai ini bergandeng tangan dengan elemen-elemen pergerakan nasional lainnya.²⁵ Sementara itu untuk memperbesar suara agar dapat memperoleh utusan di *Volksraad*, mereka meminta Vikaris Apostolik Batavia untuk mendorong pada waligereja di luar Jawa agar membentuk perhimpunan pemilih Katolik di wilayah mereka. Alasannya: “agar dapat berdiri lebih kokoh, dan memiliki daya lawan lebih besar terhadap pengaruh negatif kaum radikal-nasionalis yang revolusioner dan kaum komunis”. Argumen ini cukup berpengaruh karena sebelumnya telah terjadi pemberontakan komunis di Banten dan Sumatera Barat.²⁶

Setelah pemilihan tahun 1924, atau setahun sebelum *Indische Staatsregeling* baru tahun 1925, sekretaris PPKD, R.M.J. Soejadi diangkat sebagai anggota *Volksraad* dari fraksi IKP periode 1924-1927.²⁷ Sebagai nasionalis, ia berulang kali menekankan agenda-agenda terkait dengan perbaikan-perbaikan kecil untuk penduduk pribumi, meskipun bukan hal-hal yang revolusioner. Dalam intervensi pertamanya pada 17 Juni 1925 ia mendukung pajak murah untuk rumah jagal swasta. Ia juga memasalahkan prinsip pemisahan berdasarkan suku dan bahasa di Hindia Belanda. Ia menghendaki agar bahasa-bahasa daerah digunakan dalam dewan-dewan lokal. Ia mengakui bahwa Belanda dibutuhkan, karena itu ia meminta agar akses untuk masuk ke *Europese Lager School* (ELS, sekolah tingkat dasar yang seluruhnya berbahasa Belanda) dibuka lebih luas bagi pribumi. Dalam menjalankan peran di *Volksraad*, Soejadi tidak menonjolkan kekatolikannya. Bahkan ia memuji sebuah rumah sakit swasta Protestan di Yogyakarta karena membuka diri untuk melayani orang-orang pribumi. Setelah berhenti sebagai anggota *Volksraad* pada tahun 1927, ia tetap aktif di PPKD. Selain menjabat sebagai pengurus, sampai tahun 1933 ia ikut terlibat sebagai anggota tim yang membahas perincian lebih lanjut mengenai pemisahan negara dan agama.²⁸

PPKD sendiri menyambut positif gerakan nasional yang dipelopori oleh Soekarno di akhir 1920-an, yang menggagas suatu negara kesatuan Indonesia dan mengartikulasikan secara tegas dan khidmat gagasan itu dalam Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Memang banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia memilih strategi nonkooperasi dan menolak ambil bagian dalam *Volksraad*. Namun PPKD menempuh jalan kooperasi demi cita-cita ini. Jalan ini ditempuh karena ia meneri-

²⁴ Bank, *Katolik*, hlm. 45.

²⁵ Hardawiryana, “The Involvement”, hlm. 18-19.

²⁶ Bank, *Katolik*, hlm. 45-46.

²⁷ Ibid. Juga Hardawiryana, “The Involvement”, hlm. 18 dan Steenbrink, “Orang-orang Katolik”, hlm. 88.

²⁸ Ibid.

ma kursi di *Volksraad*, dan karena terikat pada Gereja dan prinsip-prinsip Katolik. Kendati demikian, tahun 1929 PPKD mengirimkan utusan dalam kongres kedua federasi partai-partai dan perhimpunan-perhimpunan politik Indonesia yang diilhami oleh Soekarno, yang melibatkan organisasi nonkooperasi maupun kooperasi.²⁹

4. Kasimo dan Pilihan Kebangsaan PPKD/PPKI

Setelah tanpa wakil pada periode 1927-1931, PPKD memohon secara resmi kepada Gubernur Jenderal agar seorang Katolik pribumi ditunjuk lagi sebagai anggota *Volksraad*. Permohonan 15 Januari 1931 itu ditandatangani Kasimo, Soejadi, R.M. Sastrawinata guru di sekolah Katolik Yogyakarta, dan R. Djajaatmadja guru di *kweekschool* Muntilan. Alasannya karena jumlah Katolik pribumi sudah lebih dari 200 ribu jiwa, sebagian besar berpendidikan dengan kedudukan amat baik, dan berpengaruh pada penduduk karena kebanyakan berkarya di bidang pendidikan. Atas usulan itu Kasimo ditunjuk sebagai anggota *Volksraad*.³⁰

Dengan kedudukannya sebagai anggota *Volksraad*, Kasimo mendapat kesempatan menyampaikan pandangan-pandangan politiknya. Dalam pidato tahun 1932 ia menyatakan, walau berada di bawah kekuasaan Belanda, seluruh masyarakat bangsa-bangsa di Indonesia pada dasarnya memiliki hak untuk mengembangkan kehidupan kebangsaannya sendiri, dan karena itu juga memperjuangkan tata kenegaraannya sendiri. Belanda sebagai kekuatan kolonial dan negara berbudaya dipanggil untuk menyelenggarakan dan menyempurnakan pendidikan

²⁹ Bank, *Politik*, hlm. 49-50. Yesus menghendaki perubahan menyeluruh dalam hidup sosial, namun “revolusi sosial”, menjungkirbalikkan struktur dan mempertentangkan kawan-lawan bukan yang di maksudkan. Kasimo dan kawan-kawan di PPKD mengikuti anjuran Rm. van Lith dan Rm. Rijckevorsel memilih jalan evolusioner dengan cara kooperasi, dengan memperjuangkan perbaikan sistem politik, ekonomi dan sosial yang makin mendukung kemandirian dan kemerdekaan. Soedarmanta, *Politik Bermartabat*, hlm. 63-69. Pemerintah Hindia Belanda sendiri sejak awal abad ke-19 mengizinkan institusi agama Katolik menjalankan misinya lagi di Hindia Belanda asalkan menghindari benturan dengan agama lain dan menjaga *rust en orde* (ketenangan dan ketertiban). Posisi evolusioner ditempuh dengan tetap memperjuangkan perbaikan kehidupan rakyat dan berada di pihak mereka dalam situasi kritis. Tentang seluk beluk hal ini baca Huub J.W.M. Boelaars, OFM Cap., *Indonesianisasi, Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia*, Jakarta, Kanisius 2005, hlm. 72-76. Posisi kooperasi juga ditempuh oleh tokoh-tokoh nasional moderat seperti Mohammad Hoesni Thamrin, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Soekardjo Wirjopranoto, Wurjaningrat dan dr. Sam Ratulangi. Mikhael Dua, “Politik Pergerakan Menuju Kemandirian Bangsa”, dalam Mikhael Dua dkk. (editor), *Politik Katolik, Politik Kebaikan Bersama. Sejarah dan Refleksi Keterlibatan Orang-orang Katolik dalam Politik Indonesia*, Jakarta, ISKA, Pusat Pengembangan Etika Atma jaya, dan Obor 2008, hlm. 39.

³⁰ Ibid., hlm. 89-90. Pengangkatan ini juga menyertakan peran Rm. Rijckevorsel SJ yang menyarankan kepada Gubernur Jenderal agar Kasimo diangkat sebagai anggota *Volksraad*. Saat itu Kasimo berusia 31 tahun dan telah menjadi pemimpin PPKD. Bank, *Katolik*, hlm. 46. Soedarmanta, *Politik Bermartabat*, hlm. 69-84 cukup banyak memberi gambaran tentang kehidupan yang dijalani oleh Kasimo sebagai anggota *Volksraad*.

masyarakat bangsa-bangsa di Nusantara. Ketika kesejahteraan rakyat terwujud, pemerintahan otonom dan akhirnya pemerintahan sendiri bagi masyarakat bangsa-bangsa Indonesia dapat diberikan. Lebih tegas lagi Kasimo menyatakan bahwa Vikaris Apostolik Batavia, Mgr. A.P.F. van Velsen SJ telah memberi kuasa padanya untuk menyatakan bahwa sebagai pimpinan Gereja Katolik di wilayah Hindia Belanda sang vikaris “sepakat dengan pernyataan asas yang sepenuhnya sejalan dengan ajaran politik Katolik ini”.³¹

Sebenarnya Kasimo bukanlah orang pertama dari golongan Katolik yang mengangkat gagasan liberal semacam ini di masa itu, tentang hak masyarakat mengembangkan diri sesuai dengan kebangsaannya. Tiga tahun sebelumnya, Schmutzer dari IKP menyampaikan hal yang sama dalam sidang *Volksraad*. Namun pada pidato Kasimo terdapat bobot lebih karena terdapat kata “Indonesia” di belakang kata-kata “masyarakat bangsa-bangsa”, yang tidak terdapat pada pidato Schmutzer. Selain itu, pernyataan Kasimo bernilai politis yang jauh lebih serius karena kuasa dari Vikaris Apostolik Batavia untuk menyampaikan kesepakatan beliau yang penuh atas usulan itu, ditinjau dari segi ajaran politik Katolik.³²

Pandangan Kasimo tentang pembangunan Hindia Belanda menuju kemerdekaan yang lebih besar ini didasari suatu kutipan kegemaran dari pemikir sosial Katolik Spanyol awal abad ke-20, J.M. Llovera: “Setiap bangsa berhak untuk membentuk sebuah negara merdeka”. Kutipan lain yang disukainya berasal dari gurunya sendiri, Rm. van Lith, berbunyi: “Jawa, yang bertumbuh kembang menjadi Hindia-Belanda, dan seluruh Nusantara, pada akhirnya akan melihat kembali masa kejayaannya, bangkit serta dilahirkan kembali untuk merebut tempatnya yang selayaknya dalam galeri bangsa-bangsa.”³³

Ketika Soekarno, Hatta dan tokoh-tokoh penting lainnya ditahan dan dibuang, dan partai-partai nasional terpenting dilarang, para anggota *Volksraad* bangsa Indonesia tampil memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dalam sidang-sidang mereka. Usaha paling menonjol dari nasionalisme kooperasi para

³¹ Ibid., hlm. 47. Juga Hardawiryana, “The Involvement”, hlm. 19 dan Steenbrink, *Orang-orang Katolik*, hlm. 90.

³² Bank, *Katolik*, hlm. 47. Pidato Kasimo sebagian ditulis oleh H. Buurman van Vreeden, orang Katolik eksentrik kelahiran Belanda. Steenbrink, *Orang-orang Katolik*, hlm. 90. Melalui Mr. H.C.J. Buurman van Vreeden 5 hari sebelum berpidato Kasimo memperoleh kuasa untuk menyampaikan peneguhan dari Vikaris Apostolik Batavia dalam *Volksraad*. Kasimo memberi bobot gerejani untuk menyatakan penghargaan kepada Gubernur Jenderal A.C.D. de Graeff yang akan meletakkan jabatan, atas pengertiannya terhadap pergerakan nasional. Seperti pendahulunya, Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg dan J.P. van Limburg Stirum, dalam kebijakan-kebijakannya de Graeff bermaksud “membuat mandiri masyarakat bangsa-bangsa Indonesia”. Bank, *Katolik*, hlm. 47.

³³ Steenbrink, *Orang-orang Katolik*, hlm. 90-91. Steenbrink merujuk pada Gerry Arend van Klinken, *Minorities, Modernity and Emerging Nation: Christians in Indonesia. A biographical Approach*, KITLV Press, Leiden 2003, hlm. 55. Tentang J.M. Llovera ini bisa diperiksa <http://blogs.iec.cat/scf/historia/presidents/josep-maria-llovera-i-tomas/yang-memuat-secara-singkat-riwayat-hidupnya> – link dibuka pada 13 September 2017. Rupanya pemikiran yang dikutip berasal dari buku berjudul *Tratado de sociologia cristiana* (1909).

anggota *Volksraad* ini tampak dalam “Petisi Soetardjo” tahun 1936, yang turut ditandatangani oleh Kasimo. Penandatanganan pertamanya seorang pejabat pemerintah, yaitu Soetardjo Kartohadikoesoemo. Para penandatanganan petisi menghendaki agar *Volksraad* meminta Pemerintah Belanda dan *Staatens Generaal* (Parlemen Belanda) menyelenggarakan konferensi yang mengakui kemandirian Hindia Belanda secara bertahap, dalam waktu 10 tahun. Petisi yang mempermalukan Gubernur Jenderal ini berhasil lolos di *Volksraad*, tetapi ditolak oleh Pemerintah dan Parlemen Belanda.³⁴

Setelah Petisi itu, Kasimo dan para penandatanganan lain kian meninggalkan posisi di luar pergerakan nasional yang terorganisasi, dan berkomitmen menjadi bagian dan mencapai tujuan lebih jauh dan lebih radikal dalam gerakan tersebut. Sebelum itu, tahun 1933 PPKD telah mengubah nama menjadi Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI), meski mayoritas anggotanya tetap orang-orang Jawa Tengah. Perubahan nama yang sebenarnya lebih bersifat simbolis ini tentu ikut berkontribusi bagi penguatan gagasan tentang persatuan Indonesia.³⁵

Tahun 1938 dua orang anggota Parlemen Belanda dari *Rooms-Katholieke Staatspartij* (RKSP, Partai Negara Katolik Roma), Mr. Frans Teulings dan Max van Poll datang ke Indonesia pada perayaan ulang tahun ke-20 IKP. PPKI menjadi “tuan rumah kedua” setelah IKP. Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh PPKI di Solo dan Yogyakarta tampak adanya perbedaan sikap dan loyalitas kebangsaan pada masing-masing pihak, meskipun keduanya sama-sama menempatkan diri sebagai saudara dalam satu iman. Kedua utusan dari Belanda dengan halus berupaya mempengaruhi Kasimo dan para pemimpin Katolik Hindia Belanda agar sepakat untuk menempatkan negeri mereka dalam kekuasaan Belanda. Namun bagi Kasimo dan kawan-kawan, memeluk agama dari Eropa tidak berarti harus tunduk pada suatu negara Eropa. Mereka tetap ingin berada dalam kelompok pergerakan nasional, meski berjuang dengan cara-cara kooperatif, dengan tetap berharap agar negara Indonesia yang baru kelak dapat memberi ruang kebebasan bagi kelompok minoritas agama.³⁶

Dengan sikap ini pada tahun 1939 Kasimo dan PPKI menjadi anggota Gaboengan Politik Indonesia (GAPI) untuk memperjuangkan parlemen penuh Indonesia.³⁷ Tindakan ini kian mengasingkan Kasimo dari IKP yang sejak tahun 1935 juga semakin konservatif. Hal ini juga menjadi bukti bahwa menyatukan orang-orang Katolik yang berbeda kebangsaan di Hindia Belanda secara politik agar be-

³⁴ Bank, *Katolik*, hlm. 50-51. Juga Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia*, New York: Cambridge University Press, 2005, hlm. 23, juga hlm. 239.

³⁵ Di sini Bank mengutip pernyataan Abeyesekere tentang pergeseran orientasi politik ini. *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 51-53.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

rada di dalam satu front merupakan kemustahilan.³⁸

5. Pendudukan Jepang dan Revolusi Indonesia: Penegasan Garis Perjuangan

Pada tahun 1941 PPKI mempunyai 41 cabang di seluruh Hindia Belanda. Namun perubahan paling mendasar terjadi saat Perang Dunia II, khususnya saat Jepang menduduki wilayah Hindia Belanda pada tahun 1942. Masuknya Jepang menciptakan suasana yang sangat militeristik dan opresif di masyarakat, tak jarang disertai dengan tindak kekerasan oleh para serdadunya. Organisasi-organisasi politik dibubarkan, dan hanya beberapa kelompok nasionalis saja yang ditoleransi. Selanjutnya organisasi-organisasi yang tersisa ini beserta para tokohnya menjalankan politik kooperasi dengan Jepang. Dibentuk organisasi pemuda yang memberikan pelatihan-pelatihan militer (PETA, Pembela Tanah Air), dan dimana-mana diadakan kerja paksa (*romusha*). Dari pihak Katolik, rohaniwan-rohaniwati dan pemimpin awam berkebangsaan Belanda disiksa dan dipenjara, sementara kaum pribumi Katolik berjuang mempertahankan iman yang mereka warisi dengan penuh keyakinan.³⁹

Sebagai mantan anggota *Volksraad*, Kasimo dianggap oleh Jepang sebagai musuh dan penentang. Bersama dengan beberapa tokoh masyarakat Surakarta lainnya ia ditangkap oleh Kempetai dengan status tahanan politik. Ia sempat menjalani penjara selama hampir 2 bulan, dan menyaksikan kekejaman yang dilakukan untuk mengorek keterangan dari para tahanan. Kegiatan Partai Katolik lumpuh total. Gedung-gedung misi disita, kegiatan keagamaan diawasi, penggunaan bahasa Belanda dalam kegiatan rohani dilarang. Kasimo meneruskan pekerjaannya di dinas pertanian sebagai *adjunct landbouw consulent* yang kini diletakkan di bawah kuasa Sunan Paku Buwono XI dari Kasunanan Surakarta. Dengan tugas itu Kasimo membimbing para mantri atau demang tani di wilayah tersebut.⁴⁰

Pada saat pendudukan Jepang ini kesadaran nasional dan politik yang paling mendasar tumbuh dalam diri Kasimo. Baginya, setelah menyerah tanpa syarat kepada Jepang, pemerintah Hindia Belanda sudah tidak mempunyai hak lagi atas Indonesia. Begitu pula kemudian, ketika Jepang menyerahkan kedaulatannya ke-

³⁸ Steenbrink, *Orang-orang Katolik*, hlm. 91. Perbedaan prinsip politik yang terus berlangsung dalam isu-isu kebangsaan antara IKP dan PPKI yang sama-sama Katolik dapat dilihat dalam Bank, *Katolik*, hlm. 53-63. Seterusnya, “sikap perlawanan evolusioner-radikal” saat Kasimo menjadi anggota *Volksraad* lihat Anhar Gonggong, “Prolog. Kasimo: Politik Bermartabat”, dalam Soedarmanta, *Politik Bermartabat*, hlm. xxi-xxiv.

³⁹ Hardawiryana, “The Involvement”, hlm. 19. “Mengingat hubungan baik antara Sang Kaisar dan pimpinan Gereja di Vatikan”, para misionaris berkebangsaan Belanda dan beberapa pastor berkebangsaan Indonesia, tidak dijatuhi hukuman mati, melainkan penjara 10 tahun. Soedarmanta, *Politik Bermartabat*, hlm. 104-107.

⁴⁰ *Ibid.* Lihat juga Dua, *Politik Katolik*, hlm. 42-43. Soedarmanta, *Politik Bermartabat*, hlm. 110-112.

pada Sekutu, hak itu juga tidak lagi dimiliki oleh Jepang. Maka setelah Jepang kalah, pilihan umat Katolik Indonesia bukanlah mengikuti hukum atau “logika” politik internasional saat itu dengan berharap pada datangnya kembali pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Sekarang adalah saatnya bagi umat Katolik Indonesia untuk turut bergabung dengan saudara-saudarinya sebangsa yang telah menyatakan kemerdekaannya di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Bagi Kasimo, golongan Katolik wajib ikut berjuang dan bila perlu berkorban bagi revolusi Indonesia. Bahwa suatu organisasi Katolik menyetujui revolusi menentang pemerintahan yang dianggap sah oleh hukum internasional pada masa itu, merupakan sesuatu yang revolusioner.⁴¹

Pada zaman Jepang, Kasimo masih bersedia menjadi anggota dewan yang dibentuk oleh para tokoh politik Indonesia untuk mendukung Poetera (Poesat Tenaga Rakjat), suatu organisasi penyokong pemerintahan pendudukan Jepang. Namun selebihnya dia menolak bekerja sama dengan rezim itu. Akibatnya kelak, ia tidak dilibatkan dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan oleh pimpinan militer Jepang pada tahun 1945. Maka juga, karena politik non-kooperasi ini, tidak ada wakil agama Katolik pada saat Undang-Undang Dasar 1945 disusun, karena representasi terpentingnya, yaitu Kasimo, dari awal tidak disertakan di dalam panitia-panitia yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan.⁴²

Namun tak lama setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Kasimo sebagai utusan Partai Katolik tampil kembali ke panggung politik nasional sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) bersama 136 orang lainnya 10 hari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 27 Agustus 1945. Saat itu sikap negara baru ini mengenai kedudukan agama-agama telah diputuskan, yaitu dengan kesepakatan menghapuskan 7 kata dari sila pertama Pancasila pada Piagam Jakarta. Dengan demikian agama-agama dapat hidup secara sah, bebas dan setara. Posisi ini tentu sesuai dengan harapan Partai Katolik, sementara pandangan-pandangan Katolik tentang kebangsaan sendiri rupanya telah diketahui jauh-jauh hari oleh Soekarno pada saat ia menjalin kontak dengan para misionaris Katolik dalam pembuangannya di Ende.⁴³

Selain Kasimo, yang dengan nalar politik dan hukumnya dengan tegas memposisikan golongan Katolik di pihak Republik, juga terdapat tokoh Katolik

⁴¹ Ibid., hlm. 109-110.

⁴² Bank, *Katolik*, hlm. 173-174.

⁴³ *Ibid.* Tentang pengangkatan sebagai anggota KNIP lihat juga Soedarmanta, *Politik Bermartabat*, hlm. 121-124. Secara khusus Soedarmanta mencatat pendapat politik Kasimo yang membawakan sudut pandang Katolik terhadap Republik Indonesia. Pendapat itu selanjutnya mendasari gerak perjuangan Kasimo dan Partai Katolik dalam perpolitikan bangsa Indonesia. Dengan tegas Kasimo menerima Republik Indonesia karena Republik Indonesia mempunyai kuasa yang halal dan sah menurut hukum, baik menurut terjadinya dan adanya (*de jure, naturali* atau *natuuerechtelijk*, sesuai dengan hukum kodrat) maupun menurut sikap dan perbuatannya dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari sebagai pemerintah. Orang Katolik wajib membela, mempertahankan dan memperkuat pemerintahan Republik Indonesia karena pemerintahan ini berdaulat menurut hukum.

lain yang berperan sentral dalam penyatuan umat Katolik dengan Republik, yaitu Vikaris Apostolik Semarang, Mgr. A. Soegijapranata SJ. Secara tegas ia memihak pada kemerdekaan Indonesia. Menurut Soegija, dengan berpartisipasi dalam Republik, para pemimpin Katolik dapat memberikan pengaruh moderat dan menyumbangkan nilai-nilai Katolik yang mereka miliki bagi perkembangan gerakan kemerdekaan. Dengan cara ini mereka sekaligus menghilangkan kecurigaan bahwa umat Katolik pribumi adalah kaki tangan penjajah. Bahkan menurutnya, para misionaris Belanda pun juga harus memiliki jiwa seorang gembala yang berani melawan segala hal yang merugikan Gereja Katolik di tengah negara yang baru berdiri ini, “kalau perlu dengan hati yang berdarah, dan dengan rasa nyeri yang luar biasa”.⁴⁴

Seiring dengan sikap Kasimo dan Soegija, individu-individu dan organisasi-organisasi Katolik Indonesia menggabungkan diri dengan Republik. Dengan keputusan ini, kehadiran Gereja Katolik di Indonesia praktis juga turut diselamatkan. Tidak sedikit tokoh dan pemuda Katolik dengan semangat mendaftarkan diri sebagai tentara Republik untuk membuktikan bahwa umat Katolik Indonesia bukan antek VOC. Atau seperti dikatakan oleh Kasimo: “Kita siap untuk memberikan pengorbanan, kalau perlu pengorbanan yang paling berat pun demi kepentingan tanah air”. Antara lain untuk menegaskan pilihan bagi Republik ini didirikan Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia (AMKRI), barisan untuk para pemuda.⁴⁵ Kelak tokoh-tokoh yang dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia, misalnya Ignatius Slamet Rijadi, Agustinus Adi Sucipto dan Josaphat Sudarso, selain Kasimo dan Soegija sendiri, menjadi bukti ketegasan pilihan orang-orang Katolik Indonesia pada Republik.⁴⁶

⁴⁴ Bank, *Katolik*, hlm. 176-177.

⁴⁵ Bank, *Katolik*, hlm. 177-180. Menurut Soegija, salah satu pendirinya, AMKRI didirikan agar pemuda Katolik terbebas dari “pengaruh sesat” organisasi-organisasi sosialis dan komunis. Pada 10-11 November 1945 AMKRI ikut sebagai peserta kongres pemuda yang bermaksud menempatkan semua organisasi pemuda Indonesia di dalam satu wadah perjuangan. Tentang kongres ini dan kesepakatan untuk membentuk suatu federasi yang longgar serta keikutsertaan Pemuda Katolik di dalamnya lihat Benedict R. O’G. Anderson, *Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistance 1944-1946*, New York: Cornell University Press, New York 1972, hlm. 253-256. Anderson membahas rivalitas antara pendekatan diplomatik moderat yang realistik dari Soetan Sjahrir dan pendekatan revolusi sosial radikal dari Tan Malaka, di tengah persaingan kekuasaan pasca Perang Dunia II di dunia internasional. Proses ini di menangkan oleh kubu Sjahrir, di mana Partai Katolik menjadi salahsatu bagiannya. Tentang posisi Partai Katolik dalam percaturan ini lihat *Ibid.*, hlm. 314, 319, 379 dan 399.

⁴⁶ Berita pemihakan orang-orang Katolik generasi pertama di Indonesia kepada Republik selama beberapa waktu tak diketahui orang Belanda. Frans Goedhart, wartawan dan anggota Majelis Rendah dari Partai Buruh (PvdA, *Partij van de Arbeid*) yang masuk ke wilayah Republik terkejut melihat perayaan ulang tahun pertama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1946 di Yogyakarta. Katanya: “Beberapa rohaniwan Katolik ambil bagian dalam upacara peringatan resmi yang diselenggarakan di istana Ir. Soekarno. Seorang dari pada pendeta itu mengatakan kepada saya bahwa pagi itu juga di semua gereja Katolik diselenggarakan misa bagi kesejahteraan Republik dan Presidennya”. Ia ber temu dengan seorang pemuda yang memintanya menyampaikan kepada para pemuda Katolik Belanda bahwa “pemuda Katolik di Indonesia adalah orang-orang Republikan, dan kami ingin menjadi teman yang sederajat dengan pemuda negeri Belanda”. *Ibid.*, hlm. 181-182.

AMKRI didirikan pada bulan November 1945, menjelang dibentuknya Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) di Solo pada tanggal 8 Desember 1945. Waktu pendirian yang berdekatan menggambarkan keserempakan umat Katolik dari lapisan tua dan berpengalaman dalam politik dan generasi yang lebih muda. Integrasi kedua golongan ini sesungguhnya tak berlangsung seketika. Diperlukan beberapa waktu karena adanya anggapan bahwa pada para pemimpin dari golongan yang lebih tua kurang tangguh dalam berjuang. Setelah semangat kemerdekaan “kembali pada proporsinya yang lebih normal”, dan orang muda menyadari bahwa kehati-hatian juga diperlukan, kepemimpinan Kasimo diterima oleh mereka.⁴⁷

6. Perjuangan Hingga Pengakuan Kedaulatan Republik

PKRI sendiri merupakan kelanjutan PPKI yang tak lagi berkegiatan di zaman Jepang. Partai dengan nama yang mencerminkan semangat keberpihakan pada Republik ini didirikan kembali setelah sistem parlementer di bawah Soetan Sjahrir dibuka. Partai Katolik Nasional Indonesia (PKNI) yang dibentuk di Medan pada bulan Oktober 1945 bergabung ke dalam PKRI pada bulan Januari 1946. Pada bulan Desember 1945 Partai Katolik merumuskan program urgensi yang berbicara tentang perlunya menciptakan hubungan baik di antara agama-agama di negara baru Indonesia, dan tentang pentingnya pengakuan dan pembelaan bagi Republik. Negara-negara lain, termasuk juga Vatikan, harus mengakui kemerdekaan Indonesia. Juga dituntut adanya rencana tiga tahap bagi ekonomi Indonesia.⁴⁸

Namun, pengakuan atas Republik baru ini secara internasional amat ditentukan oleh proses-proses politik di Indonesia dan di Belanda sendiri di satu sisi, serta upaya-upaya perundingan Indonesia-Belanda di sisi lain. Proses yang amat panjang inilah selanjutnya yang mewarnai langkah-langkah politik Partai Katolik, yang direpresentasikan oleh Kasimo.

Karena alasan keamanan, Soekarno-Hatta beserta jajaran pemerintahan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta sejak 3 Januari 1946. Pasukan Belanda telah menguasai sebagian besar Pulau Jawa dan Sumatra, sehingga kekuasaan Republik Indonesia *de facto* hanya meliputi wilayah yang sempit. Sejalan dengan pindahnya pusat pemerintahan, sejak 17 Februari 1947 Mgr. A. Soegijapranata SJ memindahkan pusat pelayanan pastoral umat Kevikarian Apostolik Semarang ke Yogyakarta. Baginya, inilah cara menunjukkan dukun-

⁴⁷ Bank, *Katolik*, hlm. 180. Kahin mencatat terdapat kurang dari 50.000 orang Katolik Indonesia di Jawa dan Sumatra, tetapi dengan tingkat pendidikan dan posisi sosial yang tinggi. Sementara mayoritas orang Katolik tinggal di daerah yang diduduki kembali oleh Belanda, antara lain Flores, Timor dan Ambon. George Mc Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, New York: Cornell University Press, 1952, hlm. 158.

Ibid.

gan kepada Republik Indonesia beserta segenap pemerintahannya.⁴⁹ Pejuang-pejuang Katolik sendiri tergabung dalam kelompok laskar, seperti misalnya Ignatius Slamet Rijadi, maupun dalam pemerintahan dan politik seperti Kasimo. Secara rohani Mgr. Soegija bersama para imam, termasuk imam-imam Belanda, menjadi penasihat dan pemberi kekuatan.

Sementara publik Belanda, dan masyarakat Katolik di sana, terpecah pendapatnya mengenai isu kemerdekaan Indonesia ini,⁵⁰ secara internal di pihak Republik sendiri terdapat 2 kubu politik yang berselisih paham menyikapi Belanda untuk mewujudkan kemerdekaan sepenuhnya. Perselisihan ini tak lepas dari persaingan global negara-negara dan ideologi-ideologi pasca Perang Dunia II, yang kelak disebut Perang Dingin. Kubu yang lebih moderat dan realistik dipimpin oleh Soetan Sjahrir, Perdana Menteri dan wakil Republik Indonesia di mata dunia internasional. Kubu ini mengutamakan pendekatan diplomatik. Kubu lainnya menghendaki pendekatan revolusi sosial yang radikal, dengan pemimpin Tan Malaka.⁵¹

Dari sisi politik Sjahrir, didukung Soekarno, Hatta dan Amir Sjarifuddin, berhasil meyakinkan rakyat dan para pemuda tentang posisi moderatnya, sementara Tan Malaka, yang memang tidak memiliki basis organisasi pendukung, gagal memperoleh simpati meskipun semula memiliki daya tarik khususnya bagi kalangan pemuda yang menginginkan perubahan-perubahan sosial yang seketika. Kasimo sendiri dalam hal ini berada di pihak Sjahrir.⁵²

Setelah krisis disertai penculikan Sjahrir oleh para pendukung Tan Malaka pada awal Juli 1946 berhasil di atasi, Sjahrir diberi kesempatan kembali oleh Soekarno untuk menyusun kabinet baru dan mempersiapkan tim perunding. Pihak Belanda sendiri memasukkan Max van Poll, seorang tokoh Katolik anggota KVP (Partai Rakyat Katolik), ke dalam Komisi Jenderal yang juga bertugas menjadi tim perunding dari pihak Belanda.⁵³ Rupanya karena keberadaan tokoh KVP ini, Sjahrir memasukkan Kasimo, seorang Katolik yang pernah menjadi anggota

⁴⁹ G. Budi Subanar SJ, *Kesaksian Revolusioner Seorang Uskup di Masa Perang. Catatan Harian Mgr. A. Soegijapranata SJ, 13 Februari 1947-17 Agustus 1949*, hlm. xiv-xv. Lihat juga Soedarmanta, *Politik Bermartabat*, hlm. 129. Soedarmanta mencatat tanggal kedatangan Mgr. Soegija di Yogyakarta tanggal 13 Februari 1947, namun Subanar mencatat tanggal 17 Februari 1947. Sepertinya Soedarmanta merujuk pada Subanar, namun ia tidak tepat dalam menuliskan tanggal kedatangan Mgr. Soegija ini.

⁵⁰ Bank secara panjang lebar dan runut membahas proses perpecahan di kalangan politisi Katolik Belanda yang direpresentasikan oleh *Katholieke Volkspartij* (KVP, Partai Rakyat Katolik) mengenai kemerdekaan Indonesia dalam Bank, *Katolik*, hlm. 241-376. Partai ini mendapat dukungan dari para uskup Belanda, sehingga sedikit banyak mencerminkan kesatuan Katolik Belanda di bidang politik. Dalam pemilu memilih anggota Majelis Rendah tanggal 17 Mei 1946, partai ini memperoleh suara 30,8 % dari total pemilih. *Ibid.*, hlm. 264-265.

⁵¹ Misalnya lihat ulasan George McT. Kahin dalam Anderson, *Java in a Time*, hlm. viii-ix. Sebagaimana diulas oleh Kahin, Anderson membahas rivalitas antara kubu Soetan Sjahrir dan Tan Malaka ini dalam keseluruhan bukunya. Proses ini akhirnya dimenangkan oleh kubu Sjahrir.

⁵² Partai Katolik, diwakili oleh Kasimo, menjadi bagian dari koalisi pendukung Sjahrir. Posisi Partai Katolik dalam percaturan ini tampak dalam Anderson, *Java in a Time*, hlm. 314, 319, 379 dan 399.

⁵³ Bank, *Katolik*, hlm. 290-291.

Volksraad pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan berpolitik non-kooperasi pada saat pendudukan Jepang seperti halnya Sjahrir, ke dalam tim perunding di pihak Republik. Kiranya ini akan memberi citra yang baik di mata Belanda.⁵⁴

Sebagai anggota delegasi perunding dari pihak Republik, Kasimo diam-diam sempat bertemu dengan Max van Poll yang dikenalnya dengan baik tahun 1938, saat tokoh ini datang ke Batavia sebagai utusan KVP untuk menghadiri perayaan 20 tahun IKP sebagai wadah politik orang-orang Katolik Belanda pada waktu itu. Ia mendesak van Poll agar pengaruh politiknya yang besar digunakan untuk mencegah pemerintah Belanda mewujudkan niat melakukan aksi militer, yang akan membawa akibat buruk pada kedua pihak. Tanggapan van Poll dingin-dingin saja, yang menandakan bahwa ia tak sependapat dengan Kasimo. Serangan militer yang disebut “aksi polisionil” itu akhirnya berlangsung pada 27 Juli 1947.⁵⁵

Tonggak penting diplomasi tercapai lewat Persetujuan Linggarjati, yang dimulai pada 12 November 1946 dan ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1947. Perundingan berlangsung di bawah tekanan Inggris yang mengemban mandat Sekutu untuk menyelesaikan sengketa di wilayah Indonesia. Prinsipnya, Pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai penguasa *de facto* atas Jawa dan Sumatra. Kedua pihak akan bekerja mematangkan suatu negara federal yang demokratis dan berdaulat, meliputi Republik Indonesia, Kalimantan dan Timur Raya (Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku dan Papua Barat), yang akan bergabung dengan Belanda dalam suatu Uni Indonesia-Belanda. Persetujuan ini tidak terwujud karena Belanda menolak keikutsertaan Republik dalam mengambil keputusan tentang wilayah yang berada di bawah kontrol kekuasaannya, dan karena pelanggaran terhadap gencatan senjata oleh kedua pihak, yang disusul dengan “aksi polisionil” oleh Belanda.⁵⁶

⁵⁴ Kisah Kasimo dalam H. Rosihan Anwar (ed.), *Mengenang Sjahrir, Seorang Negarawan dan Tokoh Pejuang Kemerdekaan yang Tersisih dan Terlupakan*, Jakarta:Gramedia 2010, hlm. 211. Lihat juga Soedarmanta, hlm. 137-138, yang rupanya merujuk ke sini. Sesudah Persetujuan Linggarjati ditandatangani, Soekarno mengangkat Kasimo sebagai anggota delegasi yang merundingkan pelaksanaan persetujuan. Dia diikutsertakan justru ketika keadaan sudah jelas bagi orang Indonesia bahwa kedudukan KVP dalam diplomasi Belanda sudah lebih penting daripada dalam diplomasi Republik. Meskipun ia tidak berhasil membangun hubungan yang mantap dengan rekan Belandanya, ia tetap diangkat dalam Kabinet Sjarifuddin, juga Hatta. Bank, *Katolik*, hlm. 550.

⁵⁵ Anwar, *Mengenang Sjahrir*, hlm. 211-212. Kasimo mengungkapkan kekecewaannya atas van Poll dengan pepatah Belanda *De natuur is sterker dan de leer*, artinya “sifat dasar seorang lebih kuat dari pada ajaran yang diterimanya”. *Natuur* atau sifat dasar van Poll, yang negatif, mewakili nafsu milik, nafsu menang dan berkuasa yang selalu mewarnai hubungan Belanda-Indonesia sejak Cornelis de Houtmann tiba di Banten tahun 1596. Meskipun dalam ajaran, *leer*, sebagai Katolik intelektual penulis buku sosiologi ia kenyang akan prinsip-prinsip bagus tentang kemasyarakatan, keadilan (termasuk keadilan sosial), kasih sayang antarsesama dan sebagainya. Namun karena “sifat dasar mengalahkan ajaran” baginya kekerasan dan penggunaan senjata merupakan hal yang halal, meski pandangan seperti itu hanya demi menenangkan diri sendiri saja. *Ibid.*, hlm. 213.

⁵⁶ Robert Cribb dan Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, 2nd ed., Scarecrow Press, Inc., Maryland 2004, hlm. 244. Tentang seluk-beluk Persetujuan Linggarjati dan penyikapan terhadapnya hingga jatuhnya Kabinet Sjahrir lihat Kahin, *Nationalism and Revolution*, hlm. 196-212.

Jatuhnya Kabinet Sjahrir III beberapa waktu setelah Persetujuan Linggarjati disusul dengan dibentuknya Kabinet Amir Sjarifuddin tanggal 3 Juli 1947. Dalam kabinet baru ini Kasimo ditunjuk sebagai Menteri Muda Kemakmuran, berurusan dengan persoalan-persoalan ekonomi. Saat Kabinet Amir Sjarifuddin digantikan oleh Kabinet Hatta tanggal 29 Januari 1948, Kasimo tetap berada dalam kabinet, sebagai Menteri Persediaan Makanan Rakyat. Dalam tugas ini, saat Divisi Siliwangi mengalami sulitnya suplai makanan, Kasimo bertindak cepat dan langkah penyelesaiannya memuaskan Nasution, Panglima Siliwangi saat itu.⁵⁷

Selain berperan mengurus kebutuhan rakyat dalam hal pangan, kedudukan Kasimo sebagai pemimpin Partai Katolik dalam kabinet sekaligus menghadirkan nilai simbolik. Keberadaannya merupakan bukti nyata dan hidup bagi loyalitas umat Katolik pada Republik. Sementara bagi rekan Katolik dari pihak Belanda ia dapat berfungsi sebagai perantara, atau setidaknya renungan, meskipun dalam kenyataannya KVP mengabaikan keberadaannya untuk menjembatani upaya-upaya diplomasi. Dengan kedudukan ini bagaimanapun dalam politik Republik fungsi Kasimo menjadi menonjol, meskipun PKRI dalam susunan KNIP yang diperbaharui oleh Soekarno hanya memiliki 4 kursi dari keseluruhan 514 kursi.⁵⁸

Ketegasan Kasimo sendiri dan komitmen politik Partai Katolik untuk berpihak pada Republik telah dirumuskan dalam Pamflet berjudul “Dasar-dasar Perjuangan Kita”. Pamflet itu diterbitkan pada tanggal 17 Agustus 1947, tak lama setelah aksi militer Belanda pertama pada tanggal 27 Juli 1947, yang diputuskan oleh seorang tokoh KVP yang berwenang atas wilayah Hindia Belanda, L. Beel. Dalam pamflet itu dinyatakan bahwa Republik Indonesia *de facto* dan *de iure* telah diakui. Sementara hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Indonesia merupakan sesuatu yang niscaya, hanya dapat dilaksanakan di wilayah Republik.⁵⁹ Juga dibicarakan batas-batas kolonialisme, hidup berkebangsaan, hubungan Indonesia-Belanda, sikap terhadap PBB dan nasionalisme.⁶⁰ Bagi Kasimo Republik Indonesia mempunyai kuasa yang halal dan sah menurut hukum, baik menurut terjadinya dan adanya (*de jure, naturali* atau *natuurechtelijk*, sesuai dengan hukum kodrat) maupun menurut sikap dan perbuatannya dalam menjalankan kewajibannya se-

⁵⁷ Berbeda dengan kabinet Sjahrir dan Sjarifuddin yang merupakan kabinet parlementer karena bertanggung jawab kepada KNIP, Kabinet Hatta merupakan kabinet presidensial karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden Soekarno. Kabinet presidensial dipilih oleh Soekarno, dengan menunjuk Wakil Presiden Hatta sebagai formatur. Kabinet presidensial ini dipilih oleh Soekarno sebagai jalan keluar karena para politisi di parlemen yang terbelah dalam kubu Sayap Kiri dan Benteng Republik tidak berhasil dipersatukan dalam satu pemerintahan koalisi. Bank, *Katolik*, hlm. 543. Lihat juga Soedarmanta, *Politik Bermartabat*, hlm. 140-142. Nasution, yang setelah peristiwa itu masih bertemu Kasimo dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa meskipun tidak banyak bicara, namun apa yang dikatakan Kasimo selalu dapat diandalkan.

⁵⁸ Bank, *Politik*, hlm. 550.

⁵⁹ Ibid., hlm. 550-551. Jan Sihar Aritonang & Karel Steenbrink (eds.), *A History of Christianity in Indonesia*, Leiden: Leiden, 2008, hlm. 193.

⁶⁰ Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004, hlm. 274.

hari-hari sebagai pemerintah. Karena itu orang Katolik wajib membela, mempertahankan dan memperkuat pemerintahan Republik Indonesia karena pemerintahan ini berdaulat seturut hukum.⁶¹

Selain lewat pamflet, sikap Partai Katolik juga dinyatakan dalam sidang-sidang KNIP yang mengemban kuasa legislatif dari pihak Republik. Sebagai Menteri Muda Kemakmuran sekaligus ketua Partai Katolik, dalam sidang tanggal 12 November 1947, Kasimo mengkritik Amerika Serikat yang jelas memihak pada Belanda. Menurutnya, rakyat Indonesia tak bisa memahami mengapa bangsa-bangsa tertentu yang mempunyai kekuatan yang besar dengan jelas memihak Belanda, dan tidak mau mengakui hak-hak untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri yang sama berlaku juga bagi orang-orang Indonesia, sebagaimana telah dinyatakan oleh bangsa-bangsa itu sendiri dalam Piagam Atlantik dan Piagam PBB.⁶²

Tetapi dari sisi yang lain, ironi paling mendasar justru terdapat dalam perbedaan sikap politik 2 partai yang sama-sama Katolik, yaitu KVP di pihak Belanda dan PKRI di pihak Republik. Di KVP sendiri suara terpecah, antara sikap moderat terhadap keinginan rakyat Hindia Belanda, direpresentasikan oleh Kerstens, dan yang menginginkan hadirnya kembali kekuasaan Belanda secara penuh seperti dikehendaki oleh Romme dan berbagai tokoh lain.

Kerstens, yang pernah menjadi anggota *Volksraad* dan mengenal baik situasi Hindia Belanda, berpendapat bahwa tujuan Belanda “tidak dapat dan tidak boleh lagi diarahkan pada suatu Hindia yang dikelola dengan baik oleh Belanda, tetapi suatu Indonesia yang merdeka, yang mau bersatu dengan Belanda atas dasar keyakinan batin”.⁶³ Sedangkan Romme, anggota Komisi Jenderal yang berwenang melakukan perundingan, berkunjung ke Indonesia pada bulan Januari 1947 untuk menyatukan suara orang Katolik Belanda dan Indonesia. Tapi niat itu kendur setelah ia tahu bahwa orang-orang Katolik Indonesia bersuara melalui partai-partai lokal (Pendirian Masyarakat Katolik atau Pemakat, di Minahasa; Partai Katolik Rakjat Indonesia, di Makasar). Mereka menginginkan terlaksananya Persetujuan Linggarjati, yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan merancang negara federasi di masa depan. Romme semula ingin bertemu dengan Kasimo, namun pertemuan itu gagal terlaksana. Di sisi lain ia menolak berbicara dengan tokoh-tokoh Republik, dan hanya bertemu dengan Mr. Tamzil, Menteri Muda Penerangan Republik dalam pertemuan yang diwarnai salah paham.⁶⁴

Kasimo sendiri baru bisa menyampaikan pesannya kepada umat Katolik Belanda melalui Palar, anggota Majelis Rendah dari partai sosialis, pada bulan Mei 1947. Kasimo berharap agar umat Katolik Belanda melepaskan mental kolonial dan mengakui Republik Indonesia sebagai pihak yang sama menurut hukum.

⁶¹ Soedarmanta, *Politik Bermartabat*, hlm. 123.

⁶² Kahin, *Nationalism and Revolution*, hlm. 221.

⁶³ Bank, *Katolik*, hlm. 369-370.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 365-368.

“Saya sangat menginginkan agar KVP bersikap lebih progresif terhadap Indonesia. Dalam hal ini Kerstens lebih dihargai daripada Romme. Biarlah umat Katolik lebih mendengarkan kata-kata Kerstens”.⁶⁵

Romme sendiri berkesempatan berbicara dengan Kasimo, yang waktu itu menjabat menteri, saat kunjungan ke-2 ke Indonesia pada bulan Juni 1948. Pembicaraan ini tidak menghasilkan kesimpulan bersama karena masing-masing pihak merasa bahwa lawan bicara tidak memahami dirinya. Menurut Bank: “Jadi seperti percakapan antara dua orang tuli, yang menunjukkan dengan jelas bahwa jiwa mereka berbeda. Memang Partai Katolik Indonesia bisa dikatakan lahir dari tradisi Belanda, tetapi di tahun 1945 untuk selama-lamanya ia sudah menjadi pihak yang walaupun kecil, tak tergoyahkan dari Republik Indonesia.”⁶⁶

Dalam pembicaraan itu, Kasimo menjelaskan keinginannya agar prinsip-prinsip Persetujuan Linggarjati dilaksanakan, mencakup kekuasaan *de facto* Republik atas seluruh Jawa, Sumatra dan Madura. Kasimo menolak gagasan Romme tentang Uni sebagai negara di atas negara. Baginya, kerjasama langgeng, yang juga menjadi harapan Republik, hanya bisa terjadi antara 2 negara yang sama-sama berdaulat. Sebagai Menteri Persediaan Makanan Rakyat, Kasimo mengingatkan bahwa blokade Belanda mengakibatkan ekonomi tidak berkembang dan pangan menjadi langka. Hal ini hanya akan memperkuat oposisi kaum komunis terhadap Pemerintah Indonesia. Ia mengingatkan pentingnya menciptakan iklim kebebasan beragama, sebagaimana Pemerintah Hindia Belanda memajukan pendidikan Islam di Jawa Barat. Namun menurut Romme, 4 anggota dari Partai Katolik di KNIP di tengah 500 anggota lainnya tidak akan mampu menjamin terlaksananya kebebasan beragama.⁶⁷

Ketika Belanda kembali mengadakan serangan militer ke wilayah Republik pada 19 Desember 1948, beberapa menteri yang sedang berada di Solo termasuk Kasimo memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat dengan ketua Dr. Sukiman Wiryosanjoyo, Menteri Dalam Negeri, dan wakil ketua Mr. Susanto Tirtoprojo, Menteri Kehakiman.⁶⁸ Mereka bergerak ke timur, bergerilya di sekitar Gunung Lawu selama lebih kurang setengah tahun. Koordinasi antara berbagai

⁶⁵ Ibid., hlm. 368.

⁶⁶ Ibid., hlm. 551-552.

⁶⁷ Ibid., hlm. 551.

⁶⁸ Mengenai Kasimo pada masa gerilya lihat Ibid., hlm. 142-152. Lihat juga Kahin, *Nationalism and Revolution*, hlm. 392. Dalam agresi ini, Soekarno, Hatta, Agoes Salim, Sjahrir dan beberapa tokoh politik dan militer penting ditangkap dan diasingkan dari Yogyakarta ke Sumatra dan Pulau Bangka. Namun pemerintahan Republik masih bertahan karena Panglima Tertinggi TNI Soedirman berhasil lolos dan memimpin perang gerilya. Sementara itu Menteri Keuangan Sjarifuddin Prawiranegara yang melakukan perjalanan ke Sumatra untuk menjamin kesinambungan Pemerintah Republik jika terjadi perang, mengambil prakarsa membentuk pemerintahan darurat setelah mendapat berita radio. Para menteri yang lepas dari jangkauan tentara Belanda di Jawa, termasuk Kasimo di atas, membentuk komisariat setelah mendapat persetujuan Pemerintah Darurat di Sumatra itu. Bank, *Politik*, hlm. 648. Lihat juga Kahin, *Nationalism and Revolution*, hlm. 392.

elemen perjuangan di daerah Republik baik sipil maupun militer, di Jawa, Sumatra dan di Luar Negeri tetap hidup. Komunikasi berjalan dengan berbagai cara hingga aksi polisionil Belanda terbukti gagal. Tentang peran Kasimo, Nasution berkata: “Pak Kasimo-lah yang menjadi pejabat Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa. Karena itu, dari masa gerilya saya menyimpan pula surat-surat yang beliau tanda tangani. Tapi sayang peti berkas surat-surat Markas Besar Komando Jawa tersebut hilang.... Pada hakikatnya Kasimo meneken sebagai Wakil Perdana Menteri.”⁶⁹ Atas tekanan internasional, Belanda akhirnya harus menghentikan aksinya dan mulai berunding kembali dengan Indonesia. Kondisi ini membuat kedua pihak menyepakati diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB).⁷⁰

7. Konsolidasi Kepartaian Pasca KMB

Dalam KMB di Den Haag 23 Agustus sampai 2 November 1949 terdapat 3 utusan Katolik Indonesia. Mgr. Soegijapranata mengusulkan 2 orang, Dr. R.V. Soedjito mewakili Jawa Tengah dan Ir. Soewarta. Selain itu terpilih tokoh Tionghoa mewakili Negara Indonesia Timur (NIT), Mr. Ten Tjin Leng. Fokus Gereja tertuju pada masalah perumusan kebebasan beragama dan penyebaran agama, yang kelak terumuskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar RIS. Belanda bersedia untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, sementara persoalan *Nieuw Guinea* dinyatakan dalam status *geschil* (sengketa).⁷¹

Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sendiri mengharuskan umat Katolik Indonesia meninjau ulang struktur kepartaiannya, dan menghimpun berbagai partai yang ada ke dalam satu partai federasi. Mula-mula usaha dilakukan oleh KVP Hindia. Tetapi PKRI menentang, baik di Batavia maupun di Yogyakarta. Meski Mgr. Willekens bermaksud meyakinkan Kasimo bahwa demi

⁶⁹ Soedarmanta, *Politik Bermartabat*, hlm. 142-146.

⁷⁰ Cribb and Kahin, *Historical Dictionary*, hlm. 347. Di luar perhitungan Belanda, perang gerilya terus berlanjut dan perjuangan rakyat dan pemimpin Indonesia tak dapat dipatahkan. Sangat sedikit orang yang mau bekerja sama dengan Belanda. Juga Sultan menolak diberi kekuasaan. Laporan para jurnalis menyadarkan dunia internasional bahwa kenyataannya berbeda dari yang dipropagandakan oleh Belanda. Pada tanggal 21 Januari 1949 Komisi Tiga Negara (KTN, *Committee of Good Offices for Indonesia*, terdiri dari Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat dipilih oleh kedua belah pihak), melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB kegagalan Belanda melaksanakan resolusi-resolusi, dengan adanya kekacauan dan perang yang tak dapat dihentikan di wilayah yang semula dikuasai oleh Republik. Pada tanggal 20-23 Januari 1949 konferensi tentang Indonesia disponsori oleh Perdana Menteri India Nehru melibatkan utusan dari Afganistan, Australia, Burma, Srilangka, Mesir, Etiopia, India, Irak, Iran, Lebanon, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, Siria dan Yaman menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk bertindak. Pendek kata berbagai desakan Internasional dan perjuangan tak henti dari pihak Republik memaksa Belanda mundur dari langkah yang sudah diayunkan. Uraian panjang lebar proses ini lihat Kahin, *Nationalism and Revolution*, hlm. 391-433.

⁷¹ Bank, *Katolik*, hlm. 746-750.

kepentingan Katolik kerjasama harus diadakan dan semua bentuk nasionalisme harus dikesampingkan, namun maksud itu tidak tercapai. Juga meskipun IKVP (*Indische Katholieke Volkspartij*, Partai Katolik Rakyat Hindia) mendatangi kantor-kantor partai-partai Katolik di Indonesia, usaha tersebut sia-sia. Akibatnya pimpinan IKVP memutuskan membekukan partainya, dan menyerahkan inisiatif kepada PKRI. Terdapat nada penyerahan dalam ungkapan ini: “Sebagai orang Belanda tidak dapat lagi kita memutuskan, dengan cara bagaimana kerjasama politik umat Katolik Indonesia ini dilaksanakan”.⁷²

Maka inisiatif diambil oleh PKRI untuk menyatukan partai-partai Katolik Indonesia ke dalam satu wadah. Kasimo, Menteri Persediaan Pangan Rakyat dalam Kabinet Hatta II, dan terlebih Mgr. Soegijapranata, berperan besar memimpin kongres menuju penyatuan ini. Kongres yang disebut KUKSI (Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia) ini diadakan di Yogyakarta 7 sampai dengan 12 Desember 1949. Partai-partai Katolik di negara-negara bagian, yaitu Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang didirikan di Surakarta pada 8 Desember 1945, Partai Katolik Rakyat Indonesia (PKRI) yang didirikan di Flores, Partai Katolik Rakyat Indonesia (PKRI) yang didirikan di Makasar, Partai Katolik Indonesia Timor (Parkit) yang didirikan di Timor, Permusyawaratan Majelis Katolik (Pemakat) yang didirikan di Manado dan Partai Katolik Indonesia Kalimantan (Parkika) yang didirikan di Kalimantan berfusi menggabungkan diri kedalam satu wadah kepartaian dengan nama Partai Katolik (PK). Selain itu, kongres ini juga memutuskan berdirinya Pemuda Katolik, Wanita Katolik dan Buruh Pancasila sebagai wadah yang bersifat nasional.⁷³

Dalam kenyataannya, kongres yang dihadiri oleh 400 utusan ini merupakan wujud kesetiaan umat Katolik secara politik terhadap Indonesia yang baru. Pembukaan dihadiri oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Sultan Hamengkubuwono IX, para menteri dan pejabat pemerintahan serta para pimpinan Gereja seluruh Indonesia. Dalam audiensi dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, Presiden menekankan sekali lagi sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sila negara Indonesia. Sementara kongres menyatakan dukungannya untuk memilih Soekarno sebagai Presiden RIS.⁷⁴

Selanjutnya, dalam sidang KNIP sebagai parlemen Republik yang diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 1949, utusan-utusan PKRI meskipun sedikit menjadi salah satu pembela Persetujuan KMB.⁷⁵ Menurut hukum internasional, Negara Indonesia Serikat diakui kemerdekaannya pada tanggal 27 Desember 1949. Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 diakui tetap berdiri, tetapi untuk dunia luar negara ini merupakan bagian dari Neg-

72 Ibid., hlm. 750-751.

73 Ibid., hlm. 750-751. Juga Dua, *Politik Katolik*, hlm. 50-51.

74 Ibid. Juga Bank, *Katolik*, hlm. 751.

75 Ibid.

ara Indonesia Serikat yang berbentuk federal.⁷⁶

Setelah penyerahan kedaulatan, era perang berakhir. Vatikan mengakui RIS, dan pada 12 Januari 1950 mengangkat Delegat Apostolik G. de Jonghe d'Ardoye sebagai Internuntius. Doa untuk Ratu diubah menjadi doa untuk tanah air dan pemerintah. Ketentuan penggajian yang ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda tidak lagi diteruskan oleh Gereja Katolik demi menghapus kenangan akan kolonialisme. Para misionaris dianjurkan menjadi warga negara Indonesia.⁷⁷ Dengan kata lain, "Indonesianisasi" menjadi arah yang jelas dituju oleh Gereja.⁷⁸

Seiring itu Kasimo dan kawan-kawan dalam Partai Katolik melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan setelah era revolusi. Dalam kongres pertama tanggal 4 Agustus 1950 disahkan Anggaran Dasar Partai Katolik. Dinyatakan bahwa "Partai Katolik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada umumnya dan Pancasila pada khususnya dan bertindak menurut asas-asas Katolik". Sementara tujuan Partai Katolik adalah "bekerja sekuat-kuatnya untuk memperkembangkan kemajuan Republik Indonesia dan Kesejahteraan rakyatnya".⁷⁹

8. Jalan Kebangsaan dan Politik *Bonum Commune* Insan Katolik

Setahun sebelum Soekarno, Putra Sang Fajar, lahir pada tanggal 6 Juni 1901, lahir lebih dahulu Kasimo dari keluarga prajurit Keraton Kesultanan Yogyakarta. Kasimo lahir pada tanggal 10 April 1900 di awal abad baru, abad ke-20 yang diwarnai banyak perubahan, baik secara "nasional" di kawasan yang suatu saat disebut "Hindia Belanda", di benua Asia maupun di seluruh dunia. "Jaman yang terang benderang" ini oleh Soekarno disebut "Abad Revolusi Kemanusiaan"; dan "mereka yang dilahirkan dalam Abad Revolusi Kemanusiaan ini terikat oleh suatu kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas kepahlawanan." Apakah seperti ini juga Kasimo, Partai Katolik dan umat Katolik Indonesia sebagaimana tergambar dalam

⁷⁶ Bank menilai, bentuk federal merupakan konsesi terbesar yang harus diberikan oleh nasionalisme Indonesia masa revolusi, karena sejak semula nasionalisme Indonesia merupakan gerakan unitaris. Konsesi inilah yang membuka peluang untuk berkompromi dengan Belanda, yang dimungkinkan karena pengaruh Inggris dan kemudian Amerika. Bentuk federal ini ditinggalkan pada tahun 1950 selain karena perjuangan kelompok-kelompok pro-Republik di beberapa negara bagian, juga sebagai reaksi atas perebutan kekuasaan yang dilancarkan oleh Kapten Westerling dan tentara *Koninklijke Nederlandsch-Indisch Leger* (KNIL, Tentara Hindia Belanda) serta angkatan darat Belanda di Jawa Barat pada akhir Januari 1950, yang disusul dengan pemberontakan-pemberontakan lain di berbagai daerah. Seterusnya lihat dalam Bank, *Katolik*, hlm. 768-770.

⁷⁷ Ibid., hlm. 751-752.

⁷⁸ Bandingkan dengan judul buku Boelars, *Indonesianisasi*, catatan kaki no. 19.

⁷⁹ Dua, *Politik Katolik*, hlm. 51.

kisah perjuangan mewujudkan *bonum commune* “ala” revolusi kemerdekaan?⁸⁰

Kiranya tidak ada yang keliru jika pertanyaan itu diafirmasi jawabannya. Sejak awal, posisi Kasimo dan para rekan Katolik Indonesia yang mengikuti garis petuah dan “ramalan” Rm. van Lith di jalur politik diwarnai oleh keprihatinan akan nasib bangsa yang miskin, terbelakang dan secara politik kenegaraan tidak mempunyai kemandirian. Selain memikirkan perbaikan-perbaikan dalam sistem sosial, pemerintahan dan ekonomi kolonial, mereka juga secara evolutif mengembangkan pemikiran mewujudkan satu bangsa dengan pemerintahan sejajar, mandiri dan berdaulat di hadapan bangsa-bangsa lain. “Tugas-tugas kepahlawanan” putera-puteri Katolik Indonesia yang “dilahirkan dalam Abad Revolusi Kemanusiaan” ini dalam kenyataannya dijalankan penuh bakti dan tuntas, termasuk ketika harus berkorban, juga ketika kurban itu menuntut nyawa demi suatu Indonesia yang merdeka.

Jika direfleksikan dalam bingkai kajian *bonum commune* dalam tradisi umat Katolik Indonesia, tampak bahwa Kasimo dan Partai Katolik pada dasarnya berjuang menerjemahkan cita-cita dan prinsip *bonum commune* itu dalam bingkai kebangsaan, di jalan keindonesiaan. Disebut tujuan, cita-cita, karena *bonum commune* mencakup totalitas kondisi-kondisi hidup sosial yang membuat manusia mampu meraih kesempurnaan diri lahir dan batin. Selain merupakan tujuan atau cita-cita, Kasimo dan kawan-kawan rupanya memfungsikan *bonum commune* juga sebagai pedoman perjuangan, patokan cara bertindak dan berupaya.

Bagi mereka, kesatuan *bonum commune* sebagai cita-cita dan prinsip tindakan dalam berjuang rupanya merupakan keniscayaan, karena *bonum commune* sendiri menuntut adanya³ unsur hakiki pembangun komunitas manusia, yaitu penghargaan martabat pribadi manusia dan hak-hak azasinya, kesejahteraan sosial masyarakat dan perkembangannya di segala bidang, serta adanya damai, stabilitas tata sosial, keadilan dan keamanan bagi tiap warga masyarakat. Bagaimana mungkin tujuan-tujuan yang baik ini, penghargaan martabat manusia, kemajuan masyarakat dan kedamaian, dicapai dengan cara-cara yang justru melanggar martabat dan hak-hak manusia, menafikan perkembangan masyarakat di segala bidang dan mengedepankan konflik-konflik bahkan mengutamakan muslihat dan pertentangan?

Di sinilah kita melihat rasionalitas perjuangan Kasimo dan kawan-kawan Katolik, sejak pendirian PPKD pada tahun 1923 hingga fusi partai-partai beraliran Katolik menjadi satu Partai Katolik pada tahun 1950. Di satu sisi mereka menginginkan kondisi-kondisi hidup yang lebih baik bagi masyarakat terjajah melalui program-program sosial sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, serta perubahan-perubahan tata ekonomi, sosial dan pemerintahan. Di sini tampak adanya keselarasan antara program Partai Katolik dengan *bonum*

⁸⁰ Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Biography as Told to Cindy Adams*, diunggah 2 Oktober 2017 <http://libgen.io/ads.php?md5=EDC521F9E873D81A11F824023F25B240> tanpa angka halaman.

commune yang mensyaratkan perkembangan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Di sisi lain Kasimo dan kawan-kawan menginginkan sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu hak politik untuk memiliki tata pemerintahan sendiri yang berdaulat, sama sejajar di hadapan bangsa-bangsa yang lain, serta adanya kebebasan bagi setiap pribadi warga dalam mencapai tujuan-tujuan hidupnya, termasuk kebebasan dalam pilihan dan ekspresi keagamaan. Di sini tampak bahwa cita-cita perjuangan mereka persis terkait pula dengan azas pertama *bonum commune*, yang menghendaki penghormatan terhadap pribadi manusia dan hak-hak azasnya. Namun kemudian, untuk mencapai kondisi-kondisi ideal tadi, Kasimo dan Partai Katolik tidak terjebak dalam pilihan radikalisme yang justru akan kontraproduktif bagi tata sosial dan pribadi-pribadi warga. Mereka memilih cara kooperatif dan evolusioner dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pilihan ini sejalan dengan prinsip *bonum commune* yang menghendaki kedamaian dalam suatu tatanan yang berkeadilan dan menjamin keamanan.

Berkenaan dengan praksis politik *bonum commune*, yang sesungguhnya merupakan suatu prinsip yang bersifat universal, bahkan sebagai sebuah prinsip universal juga mencita-citakan suatu kesejahteraan umum yang bersifat universal (*bonum commune universale*), meliputi semua bangsa (*bonum commune nationum*) dan semua manusia (*bonum commune hominum*), tampak bahwa perjuangan Kasimo dan kawan-kawan tertuju pada pembumian *bonum commune*, yaitu *bonum commune* bangsa Indonesia. Kemudian ternyata bahwa suatu prinsip universal yang diperjuangkan dalam realitas kebangsaan yang konkret kontekstual justru menjadi bukti titik temu antara ajaran sosial politik Gereja Katolik dan nasionalisme Indonesia. Keberadaan kelompok Katolik beserta individu-individunya di berbagai lini kemerdekaan dengan “senjata” cita-cita sekaligus prinsip *bonum commune*, di antara berbagai kelompok dan aliran yang bermacam-macam etnis, suku, budaya dan agamanya, sekaligus menegaskan adanya penerimaan positif dan pengakuan terhadap semangat nasionalisme dan kesungguhan para penganut agama yang disebarkan oleh orang-orang Eropa ini.

Seperti dikatakan oleh Mgr. Soegijapranata untuk menegaskan ketakterpisahan antara kekatolikan dan keindonesiaan pada diri setiap orang Katolik Indonesia: “100% Katolik, 100% Indonesia”, demikian dalam perjuangan politik Katolik untuk meraih kemerdekaan tampak keselarasan antara *bonum commune* dan nasionalisme Indonesia, antara ajaran sosial Gereja dan ideologi Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Partai Katolik sendiri, ketika sudah berfusi dari semula partai-partai Katolik Nusantara di tahun 1950, menetapkan dalam Anggaran Dasarnya bahwa “Partai Katolik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada umumnya dan Pancasila pada khususnya dan bertindak menurut asas-asas Katolik”. Dan tujuannya “bekerja sekuat-kuatnya untuk memperkembangkan kemajuan Republik Indonesia dan Kesejahteraan rakyatnya”. Kiranya rumusan di atas merupakan kristalisasi kesadaran atas keberadaan mereka sebagai insan politik Indonesia

yang Katolik.

Di sini pula terletak kekhasan Katolik sebagai agama yang dianut oleh sebagian warga Indonesia. Dengan menjadi Katolik, orang tergabung dalam suatu wadah keagamaan yang disebut Gereja, yang memiliki tata pemerintahan dan kepemimpinan yang bersifat hirarkis dan universal meliputi seluruh dunia, dengan tuntutan ketaatan dalam hal iman dan moral. Namun dalam peristiwa Kasimo dan orang-orang Katolik Indonesia terbukti bahwa ketaatan itu bukan penghalang pilihan dan pengabdian di bidang politik. Justru ketaatan pada prinsip politik Katolik *bonum commune* membimbing mereka sampai pada pilihan untuk berjuang di jalan kebangsaan. Loyalitas keagamaan tidak bertentangan melainkan justru menginspirasi loyalitas kebangsaan. Bahkan, pilihan pada jalan kebangsaan tak lain juga merupakan buah pendidikan, pewartaan iman dan pengajaran moral Rm. F. van Lith SJ, seorang misionaris Belanda, kepada anak-anak didiknya. Dan kelak, ketika Indonesia meraih pengakuan kedaulatan dari Belanda, Vatikan merupakan salah satu negara Eropa yang paling terdahulu memberikan pengakuan kepada Indonesia dan menempatkan wakilnya di Jakarta.

Dari sini sekaligus terlihat bahwa kekatolikan bukanlah suatu masyarakat monolitik secara struktural dan politik, meskipun tunggal dalam ajaran iman dan moral, serta satu dalam ikatan spiritual dan persaudaraan. Paus merupakan pimpinan tertinggi di seluruh dunia, namun pilihan politik dan kenegaraan tidak ditentukan oleh Paus, tetapi diserahkan kepada masing-masing individu dan bangsa. Juga Gereja Katolik bukanlah sistem pemerintahan yang bermaksud mengatur dan mencukupi kebutuhan warganya di segala bidang kehidupan, misalnya dalam sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Gereja melihat bahwa hal itu justru merupakan tugas berbagai entitas sosial yang secara kodrati atau natural menjadi tempat manusia mewujudkan *bonum commune*-nya, mulai dari tingkat paling kecil yaitu keluarga, kelompok suku atau adat dan masyarakat bangsa.

Di lain pihak, kebebasan merupakan azas yang dijunjung tinggi oleh Gereja, juga bagi bangsa-bangsa dalam menentukan sistem politik dan pemerintahannya. Yang digarispawahi adalah prinsip *bonum commune* itu sendiri, yaitu asalkan kebebasan dan sistem politik yang dianut di suatu negara melayani dan mengedepankan martabat pribadi manusia dan hak-hak azasinya, menyejahterakan masyarakat seutuhnya, dan mendatangkan damai dan keamanan bagi para warga dan seluruh umat manusia. Para warga, terutama para pemegang otoritas di masyarakat termasuk para pemimpin politik, berkewajiban untuk ambil bagian bahkan memelopori upaya-upaya mewujudkan *bonum commune* dalam berbagai lingkungannya, bukan sebaliknya menggerogotinya hanya demi kepentingan pribadi, kelompok atau bangsanya.

Karena itu, misalnya, orang Katolik Indonesia memiliki kebebasan untuk menghayati kekatolikannya dalam keindonesiaannya, demikian pula orang Ka-

tolik Belanda menghayati kekatolikannya dalam kebelandaannya. Yang keliru adalah jika kebebasan, pilihan atau sistem politik dirancang dan diputuskan demi melayani hasrat keserakahan, dan ditempuh dengan tipu daya dan kekerasan. Hal semacam inilah yang dikritik oleh Kasimo sebagai sesama Katolik kepada Max van Poll, ketika tokoh Belanda yang terkemuka ini memandang Indonesia dengan kaca mata mental yang sama dengan pendahulunya, Cornelis de Houtmann, ketika mendarat di Banten pada tahun 1596. Padahal van Poll seorang cendekiawan, yang juga menulis dan mengajarkan prinsip-prinsip hidup sosial sesuai ajaran Katolik.

Sebaliknya, dengan pemahaman yang sama kita bisa menghargai lebih semestinya sumbangan Rm. van Lith, saudara sebangsa dan seiman dengan van Poll, karena yang dia lakukan sungguh diletakkan dalam bingkai *bonum commune*, kesejahteraan umum bangsa Indonesia, bahkan juga bisa kita katakan, dalam bingkai Pancasila dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bingkai perjuangan nasional dan kemanusiaan ini kiranya kita melihat dan memaknai penghargaan Tanda Kehormatan (Satyalencana) Presiden Republik Indonesia tahun 2016 yang dianugerahkan kepada Fransiscus Georgius Josephus van Lith SJ.⁸¹ Bukan hanya Kasimo, Soegija, atau Slamet Rijadi, Adi Soetjipto dan Yos Soedarso, yang nota bene berkebangsaan Indonesia, yang menjadi bagian tradisi *bonum commune* Katolik Indonesia, tetapi juga orang-orang bukan berkebangsaan Indonesia pun menjadi bagian di dalamnya.

Pada titik ini kita bertemu dengan gagasan selanjutnya yang tidak terpisah dari *bonum commune*, bahkan menjadi kunci perwujudannya pada tataran praksis, yaitu “partisipasi” (*participatio*). Partisipasi sebagai “kewajiban pribadi dalam perkara-perkara sosial yang bersifat sukarela dan keluar dari kemurahan hati” tampak sebagai garis tebal dalam narasi perjuangan umat Katolik Indonesia demi kemerdekaan bangsanya, bersama dengan semua golongan dan lapisan masyarakat. Masing-masing, sesuai dengan tempat dan perannya telah berjuang, berkorban dan bergerilya mewujudkan kondisi-kondisi kesejahteraan umum, yaitu kemerdekaan, kesejahteraan sosial serta damai dan ketenteraman. Setelah perang selesai dan Indonesia dapat bergerak lebih leluasa dalam pergaulan antarbangsa, partisipasi itu kiranya juga dapat disaksikan aktualisasinya dalam lingkup lebih luas bagi perdamaian dunia.

Demikianlah, perjuangan demi kesejahteraan umum (*pro bono communi*) bangsa Indonesia terbukti menjadi inti perjuangan dalam tradisi Katolik Indonesia sejak semula, yaitu sejak lapisan generasi pertama orang-orang Katolik Indonesia, yang direpresentasikan di bidang politik oleh Kasimo dan kawan-kawannya dari Partai Katolik. Tentulah dalam bimbingan rohani Mgr. Soegijapranata dan uskup-uskup lain serta imam-imamnya.

Sebagai “tradisi”, semangat *bonum commune* tak dapat diandaikan mun-

⁸¹ <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/2016/10/25/franciscus-georgius-josephus-van-lith-pembuka-pendidikan-guru-di-jawa/>

cul begitu saja dari insan Katolik Indonesia dan diperjuangkan sungguh-sungguh oleh mereka. Namun juga dapat dikatakan sebaliknya. Justru karena inti terdalam tradisi politik Katolik Indonesia, sebagaimana terbukti pada generasi lapisan pertama ini, adalah prinsip dan cita-cita *bonum commune*, maka insan-insan Katolik Indonesia zaman sekarang harus senantiasa membaharui dan menjaga semangat itu dalam daya upaya dan perjuangan mereka. Tuntutan ini tak terelakkan ketika umat dan Gereja Katolik Indonesia memutuskan melebur diri dalam iklim politik pasca-reformasi tanpa mengedepankan embel-embel Katolik. Yaitu untuk tetap satu dalam jiwa Katolik, dengan menjadi pejuang *bonum commune* di manapun berada. ****

Sumber Pustaka

Adams, Cindy, *BungKarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Biography as Told to Cindy Adams*, diunggah 2 Oktober 2017 melalui <http://libgen.io/ads.php?md5=EDC521F9E873D81A11F824023F25B240> tanpa angka halaman.

Adiputri, Ratih D, “The Dutch Legacy in the Indonesian Parliament”, *Political Sciences & PublicAffairs*, Volume 2, July 03, 2014, dalam <https://www.omicsonline.org/open-access/the-dutch-legacy-in-the-indonesian-parliamentl-2332-0761.1000118.pdf> diunduh pada 8 September 2017.

Anderson, Benedict R. O’G, *Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistance 1944-1946*, Cornell University Press, New York: Cornell university Press, 1972.

Anwar, H. Rosihan (ed.), *Mengenang Sjahrir, Seorang Negarawan dan Tokoh Pejuang Kemerdekaan yang Tersisih dan Terlupakan*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Argandoña, Antonio, “The Common Good”, *Working Paper* WP-937, July 2011, IESE Business School-University of Navarra, diunduh pada 15 September 2017 dari <http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0937-E.pdf>.

Aritonang, Jan Sihar& Karel Steenbrink (eds.), *A History of Christianity in Indonesia*, Leiden: Brill, 2008.

Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Jakarta:

BPK Gunung Mulia, 2004.

Bank, Jan, *Katolik di Masa Revolusi Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 1999.

Boelaars, Huub J.W.M., OFM Cap., *Indonesianisasi, Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia*, Kanisius: Jakarta, 2005.

Cribb, Robert dan Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, 2nd ed., Maryland: Scarecrow Press, Inc., 2004.

Diggs, B.J, "The Common Good as Reason for Political Action," *Ethics* 83, no. 4 (Jul., 1973): 283.

Dua, Mikhael, "Politik Pergerakan Menuju Kemandirian Bangsa", dalam Mikhael Dua dkk. (editor), *Politik Katolik, Politik Kebajikan Bersama. Sejarah dan Refleksi Keterlibatan Orang-orang Katolik dalam Politik Indonesia*, Jakarta: ISKA, Pusat Pengembangan Etika Atma jaya, dan Obor, 2008.

Hardawiryana, Robert, "The Involvement of the Laity in Politics: The Church in Indonesia", dalam *FABC Papers* No. 58, Diunduh dari http://www.fabc.org/fabc%20papers/fabc_paper_58.pdf pada 18 September 2017.

Heuken, A., *Ensiklopedi Populer Tentang Gereja Katolik di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1989.

Kahin, George McTurnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, New York: Cornell University Press, 1952.

Keys, Mary M, *Aquinas, Aristotle, and the Promise of the Common Good*, New York: Cambridge University Press, 2006.

Konferensi Waligereja Indonesia, *Katekismus Gereja Katolik*, Flores: Nusa Indah, 2007.

Sekretariat Nasional K.M., *Sejarah Gereja Katolik di Indonesia*, Kursus Kader Katolik, Sekretariat Nasional K.M./C.L.C. Jakarta 1971.

Soedarmanta, J.B, *Politik Bermartabat, Biografi I.J. Kasimo*, Jakarta: Kompas, 2004.

Steenbrink, Karel, *Orang-orang Katolik di Indonesia 1808-1942. Pertumbuhan yang Spektakuler dari Minoritas yang Percaya Diri 1903-1942. Jilid 2.*

Maumere: Penerbit Ledalero, 2006.

Subanar, G. Budi, *Kesaksian Revolusioner Seorang Uskup di Masa Perang. Catatan Harian Mgr. A. Soegijapranata SJ, 13 Februari 1947-17 Agustus 1949*, hlm. xiv-xv

Vickers, Adrian, *A History of Modern Indonesia*, New York: Cambridge University Press, 2005.

kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/2016/10/25/franciscus-georgius-josephus-van-lith-pembuka-pendidikan-guru-di-jawa/

Dokumen Gereja

Apostolicam Actuositatem (1965), dalam
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_lt.html diunduh pada 20 September 2017.

Gadium et Spes (1965), dalam
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19651207_gadium-et-spes_lt.html 15 September 2017.